



# LAPORAN KINERJA

## INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022

**Inspektorat Daerah  
Kabupaten Pamekasan  
Tahun 2023**



@itkab\_pamekasan



insp.pamekasan@gmail.com



(0324) 322613



Jalan Jokotole 143, Pamekasan



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Jokotole No. 143 Telp. ( 0324 ) 322613 Pamekasan

Pamekasan, 10 Februari 2023

Nomor : 060.1 / 96A / 432.200 / 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Laporan Kinerja  
-----

Kepada  
Yth. Kepala Bagian Organisasi  
Setda Kabupaten Pamekasan  
di-

PAMEKASAN

Bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Tahun 2022 pada  
Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dijadikan maklum.



**Dr. NURUL WIDIASTUTI**

Pembina Utama Muda

NIP 19640229 199003 2 005

LAPORAN KINERJA  
INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
TAHUN 2022



**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN**  
**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah. Kinerja Inspektorat Daerah diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah tahun 2022.

Secara umum, capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Inspektorat Daerah tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Inspektorat Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pamekasan, 10 Februari 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
INSPEKTORAT DAERAH  
P. NURUL WIDIASTUTI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640229 199003 2 005



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....</b>	<b>2</b>
<b>C. Isu Strategis Perangkat Daerah.....</b>	<b>1</b>
<b>D. Landasan Hukum.....</b>	<b>1</b>
<b>E. Sistematika.....</b>	<b>2</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>3</b>
<b>A. Rencana Strategis.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Visi.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Misi.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Tujuan dan Sasaran.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Indikator Kinerja Utama.....</b>	<b>6</b>
<b>B. Rencana Kinerja Tahun 2022.....</b>	<b>13</b>
<b>C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>21</b>
<b>A. Capaian Kinerja Organisasi.....</b>	<b>22</b>
<b>B. Realisasi Anggaran.....</b>	<b>33</b>
<b>C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....</b>	<b>34</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>39</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan Perangkat Daerah, capaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan diwajibkan untuk menyusun Laporan

Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

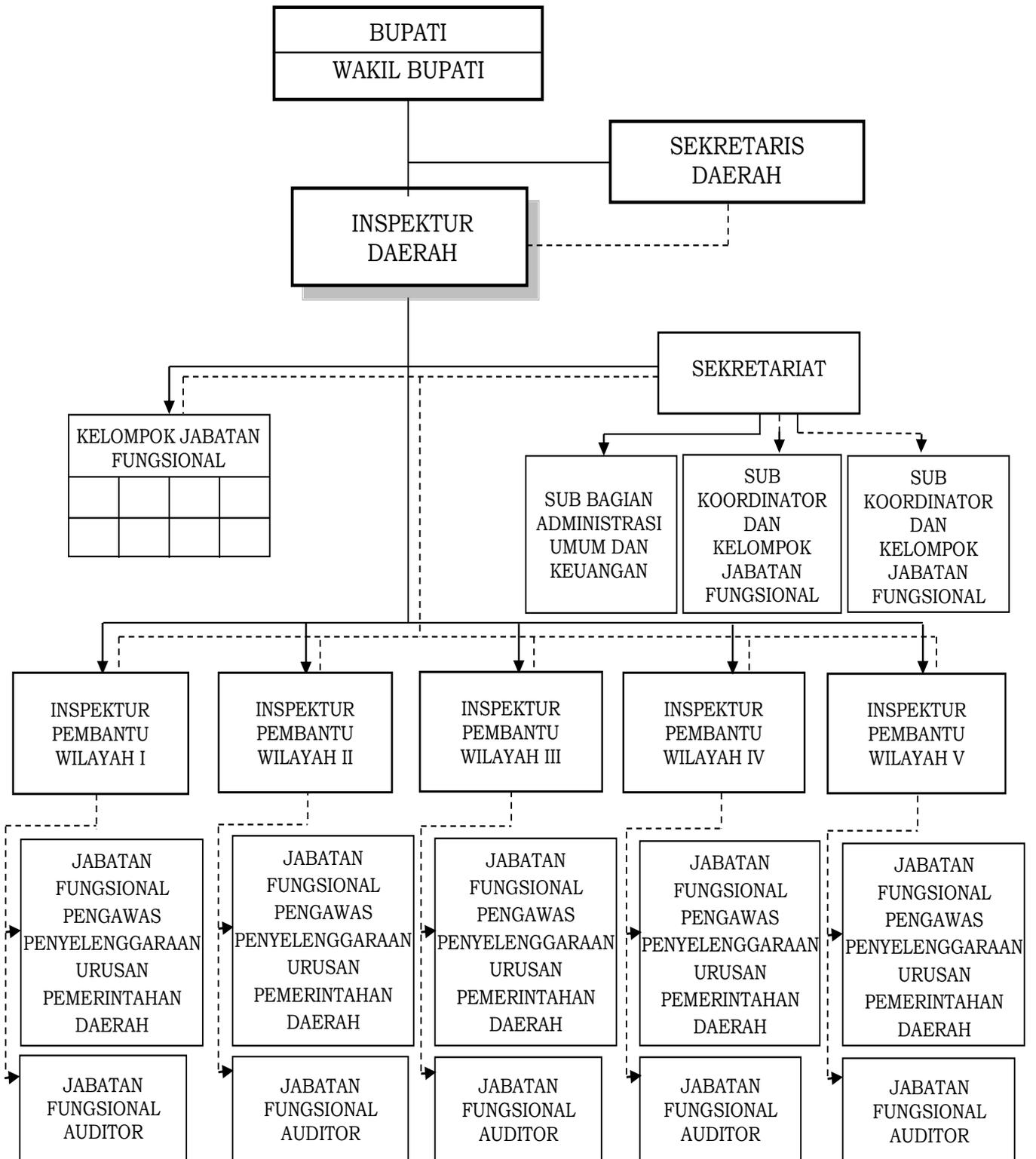
Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur Daerah. Inspektur Daerah Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas membantu Bupati Pamekasan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektur Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Inspektur sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, dan Kepala Sub Bagian. Berikut bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan. Berikut bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan.

Gambar 1.1.  
Struktur Organisasi



### **C. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Perangkat Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan Perangkat Daerah di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis Perangkat Daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Inspektorat Daerah periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. harapan masyarakat yang sangat tinggi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. tuntutan Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. cepatnya kemajuan teknologi di bidang teknologi informasi yang menuntut adanya adaptasi penerapan di lingkungan kerja;
4. tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
5. tuntutan peningkatan terhadap Kapabilitas APIP dan Tingkat Kematangan (Maturitas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah periode 2018-2023, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Tuntutan Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
3. Tuntutan peningkatan terhadap Kapabilitas APIP dan Tingkat Kematangan (Maturitas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
4. Tuntutan penerapan manajemen risiko pada setiap perangkat daerah.

### **D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022; dan
7. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

#### **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 adalah :

**BAB I            PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

**BAB II            PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

**BAB III          AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

**BAB IV          PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Pamekasan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Pamekasan sebagai Kabupaten yang RAJJA BAJRA tor PARJUGHA.

Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah:

**Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan  
Berdasarkan Nilai-Nilai Agama**

## 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 tersebut di atas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia
- b. Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri Manufaktur Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya.
- c. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- d. Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan
- e. Pengelolaan Potensi Sosial, Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera.

Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah mengacu pada Misi ke-3, yaitu dalam urusan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel yang dielaborasi dalam program kegiatan untuk mewujudkan Tujuan Inspektorat Daerah yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Melalui Penguatan Pengawasan”

## 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran strategis.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Berikut indikator dan target Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja (Sebelum Perubahan)**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan		Nilai SAKIP	80,05 (A)	80,12 (A)	81,16 (A)	81,34 (A)	82,1 (A)
			Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		1.1 Meningkatkan Kualitas Pengawasan Internal Terhadap Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Level 3 (3,2)	Level 3 (3,5)	Level 3 (3,8)	Level 4
			Tingkat maturitas SPIP	Level 3	Level 3 (3,2)	Level 3 (3,5)	Level 3 (3,8)	Level 4
			Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti:					
			APIP	100%	100%	100%	100%	100%
			BPK	82%	84%	86%	88%	90%
			Tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
					3,2	3,5	3,8	
			Persentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal A	50%	60%	75%	80%	85%
			1.2 Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien	Persentase layanan kesekretariatan yang sesuai SOP	100%	100%	100%	100%

*Sumber: Renstra Inspektorat Daerah periode 2018-2023*

**Tabel 2.2****Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja (Setelah Perubahan)**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Melalui Penguatan Pengawasan		Nilai SAKIP			81,16 (A)	81,34 (A)	82,1 (A)	
			Opini BPK			WTP	WTP	WTP	
		1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat Daerah			86	87	88
		1.2	Meningkatnya Kualitas	Kapabilitas APIP			2	3	3,1
			Maturitas SPIP			3,1	3,2	3,3	

*Sumber : Renstra (Perubahan) Inspektorat Daerah periode 2018-2023*

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama (Sebelum Perubahan)**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan**

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Melalui Penguatan Pengawasan	1.1	Nilai SAKIP	Predikat	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021	Evaluasi dilakukan komponen manajemen kinerja yang meliputi 4 komponen yang dituangkan dalam lembar kerja evaluasi, yaitu: 1. Perencanaan kinerja 2. Pengukuran kinerja 3. Pelaporan kinerja 4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal Nilai akhir penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dengan kategori: 1. AA (nilai > 90-100) 2. A (nilai > 80-90) 3. BB (nilai > 70-80) 4. B (nilai > 60-70) 5. CC (nilai > 50-60) 6. C (nilai > 30-50) 7. D (nilai > 0-30)	Laporan Hasil Evaluasi AKIP KEMENPAN dan RB
		1.2	Opini BPK	Predikat	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004	Pernyataan BPK atas Laporan Keuangan	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2.1	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Persentase	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 88 Tahun 2021	Evaluasi dilakukan komponen manajemen kinerja yang meliputi 4 komponen yang dituangkan dalam lembar kerja evaluasi, yaitu: 1. Perencanaan kinerja 2. Pengukuran kinerja 3. Pelaporan kinerja 4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal Nilai akhir penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dengan kategori: 1. AA (nilai > 90-100) 2. A (nilai > 80-90) 3. BB (nilai > 70-80) 4. B (nilai > 60-70) 5. CC (nilai > 50-60) 6. C (nilai > 30-50) 7. D (nilai > 0-30)	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	3.1	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021	Penilaian kapabilitas APIP dengan komponen yang terdiri dari 6 elemen dengan masing-masing bobot nilai, yaitu: 1. Pengelolaan SDM (18%) 2. Praktik profesional (18%) 3. Akuntabilitas dan manajemen kinerja (6%) 4. Budaya dan hubungan organisasi (6%) 5. Struktur tata kelola (12%) 6. Peran dan layanan APIP (40%) Penilaian kapabilitas APIP akan menghasilkan level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d. Level 5: 1. Optimized (Level 5) 2. Institutionalized (Level 4) 3. Delivered (Level 3) 4. Struktured (Level 2) 5. Initial (Level 1)	Laporan Hasil Evaluasi BPKP
		3.2	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021	Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi pembobotan pada 3 komponen, yaitu: 1. Penetapan tujuan 2. Struktur dan proses 3. Pencapaian tujuan Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang dengan interval: 1. Rintisan ( $1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$ ) 2. Berkembang ( $2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$ ) 3. Terdefinisi ( $3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$ )	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP BPKP

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
						4. Terkelola dan Terukur ( $4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$ ) 5. Optimum ( $\text{skor} \geq 4,50$ )	
		3.3	Jumlah temuan BPK	Jumlah	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004	Jumlah temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
		3.4	Persentase Pelanggaran Pegawai	Persentase	-	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran pada tahun } n}{\text{Jumlah seluruh pegawai}} \times 100\%$	Rekapitulasi Pelanggaran Pegawai
4	Meningkatnya Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien	4.1	Persentase Layanan Kesekretariatan yang Terpenuhi	Persentase		$\frac{\text{Jumlah layanan kesekretariatan yang terpenuhi}}{\text{Jumlah layanan kesekretariatan yang ada}} \times 100\%$	Laporan Evaluasi Pelayanan
5	Meningkatnya kualitas Pengendalian Internal	5.1	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal A	Persentase	-	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah dengan nilai AKIP minimal A}}{\text{Jumlah seluruh perangkat daerah}} \times 100\%$	LHE AKIP Perangkat Daerah

Sumber Data = Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2022

**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama (setelah Perubahan)**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Persentase	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021	<p>Evaluasi dilakukan komponen manajemen kinerja yang meliputi 4 komponen yang dituangkan dalam lembar kerja evaluasi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kinerja</li> <li>2. Pengukuran kinerja</li> <li>3. Pelaporan kinerja</li> <li>4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal</li> </ol> <p>Nilai akhir penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dengan kategori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AA (nilai &gt; 90-100)</li> <li>2. A (nilai &gt; 80-90)</li> <li>3. BB (nilai &gt; 70-80)</li> <li>4. B (nilai &gt; 60-70)</li> <li>5. CC (nilai &gt; 50-60)</li> <li>6. C (nilai &gt; 30-50)</li> <li>7. D (nilai &gt; 0-30)</li> </ol>	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	2.1	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021	<p>Penilaian kapabilitas APIP dengan komponen yang terdiri dari 6 elemen dengan masing-masing bobot nilai, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan SDM (18%)</li> <li>2. Praktik profesional (18%)</li> <li>3. Akuntabilitas dan manajemen kinerja (6%)</li> <li>4. Budaya dan hubungan organisasi (6%)</li> <li>5. Struktur tata kelola (12%)</li> <li>6. Peran dan layanan APIP (40%)</li> </ol> <p>Penilaian kapabilitas APIP akan menghasilkan level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d. Level 5:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimized (Level 5)</li> <li>2. Institutionalized (Level 4)</li> <li>3. Delivered (Level 3)</li> <li>4. Struktured (Level 2)</li> <li>5. Initial (Level 1)</li> </ol>	Laporan Hasil Evaluasi kapabilitas APIP BPKP
		2.2	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021	<p>Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi pembobotan pada 3 komponen, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan tujuan</li> <li>2. Struktur dan proses</li> <li>3. Pencapaian tujuan</li> </ol> <p>Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang dengan interval:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rintisan (<math>1,00 \leq \text{Skor} &lt; 2,00</math>)</li> <li>2. Berkembang (<math>2,00 \leq \text{Skor} &lt; 3,00</math>)</li> <li>3. Terdefinisi (<math>3,00 \leq \text{Skor} &lt; 4,00</math>)</li> <li>4. Terkelola dan Terukur (<math>4,00 \leq \text{Skor} &lt; 4,50</math>)</li> <li>5. Optimum (<math>\text{skor} \geq 4,50</math>)</li> </ol>	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP BPKP

Sumber : Indikator Kinerja Utama Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2022

## B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan telah dilakukan perubahan terkait pagu anggaran tetapi tidak berpengaruh terhadap target kinerja. Adapun Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2022:

**Tabel 2.5**  
**Rencana Kinerja Tahun 2022**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Melalui Penguatan Pengawasan		Nilai SAKIP	Predikat	81,34 (A)	
			Opini BPK	Predikat	WTP	
		1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Persentase	87
		1.2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Kapabilitas APIP	Level	3
Maturitas SPIP	Level			3,2		

*Sumber : Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2022*

## C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Pada tanggal 31 bulan Januari tahun 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Melalui Penguatan Pengawasan	1.1	Nilai SAKIP	Predikat	81,16 (A)
		1.2	Opini BPK	Predikat	WTP
2	Meningkatnya pelaksanaan fungsi pelayanan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien	2.1	Persentase Layanan Kesekretariatan yang terpenuhi	Persentase	87
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3.1	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Persentase	85,71
4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	4.1	Kapabilitas APIP	Level	3,5
		4.2	Maturitas SPIP	Level	3,5
		4.3	Temuan BPK	Jumlah	12
		4.4	Persentase Pelanggaran Pegawai	Persentase	0,18

Sumber : Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Inspektorat Daerah :

**Tabel 2.7**  
**Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2022**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Layanan Kesekretariatan yang Terpenuhi</b>	<b>88%</b>	<b>3.976.529.450</b>
<b>A</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu</b>	<b>152</b>	<b>54.350.000</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4	40.750.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	34	4.480.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dilaksanakan	34	1.640.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan	34	2.300.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang dilaksanakan	34	1.500.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	12	3.680.000
<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik</b>	<b>1</b>	<b>2.800.506.866</b>
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	27	2.800.506.866
<b>C</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang terfasilitasi</b>	<b>27</b>	<b>336.930.000</b>
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	27	336.930.000
<b>D</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah sarana yang layak fungsi</b>	<b>158</b>	<b>270.922.800</b>
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7	2.323.000
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46	19.060.800
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	48.569.000
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3	12.220.000
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	90	188.750.000
<b>E</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah prasarana yang layak fungsi</b>	<b>26</b>	<b>188.605.600</b>
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	26	188.605.600
<b>F</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan</b>	<b>1010</b>	<b>93.140.184</b>
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	1000	5.389.800

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	7	31.650.384
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	3	56.100.000
<b>G</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Yang Layak Pakai</b>	<b>201</b>	<b>232.074.000</b>
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1	36.071.000
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	4	108.040.500
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	195	25.762.000
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	1	62.200.500
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Jumlah Temuan BPK</b>	<b>11</b>	<b>1.293.183.000</b>
		<b>Persentase pelanggaran pegawai</b>	<b>0,16%</b>	<b>283.420.000</b>
<b>H</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Persentase laporan hasil pengawasan internal yang terbit tepat waktu</b>	<b>88%</b>	<b>1.293.183.000</b>
22	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan kinerja yang difasilitasi	44	615.678.000
23	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan keuangan yang difasilitasi	40	448.538.000
24	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah reviu laporan kinerja yang difasilitasi	1	35.250.000
25	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah reviu laporan keuangan yang difasilitasi	1	30.850.000
26	Pengawasan Desa	Jumlah pengawasan desa yang difasilitasi	39	127.595.000
27	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti	94%	35.272.000
<b>I</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu terbit tepat waktu</b>	<b>60%</b>	<b>283.420.000</b>
28	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah penanganan penyelesaian kerugian negara atau daerah yang ditindaklanjuti	2	33.820.000
29	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang difasilitasi	30	249.600.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
III	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal A</b>	<b>80%</b>	<b>2.055.177.000</b>
J	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan</b>	<b>100%</b>	<b>56.987.000</b>
30	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan yang dirumuskan	2	56.987.000
K	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang ditindaklanjuti oleh OPD</b>	<b>80%</b>	<b>1.998.190.000</b>
31	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	4	1.308.210.000
32	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah pendampingan, verifikasi dan asistensi penilaian Reformasi Birokrasi yang difasilitasi	21	146.220.000
33	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Nilai Capaian Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi KPK	85%	341.260.000
34	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas yang difasilitasi	44	202.500.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022

Pada tanggal 01 bulan November tahun 2022 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.8**

**Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan  
Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Persentase	87
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3
		Tingkat Maturitas SPIP	Level	3,2

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2022

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.9**

**Perubahan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2022**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>ANGGARAN</b>
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase Layanan Kesekretariatan yang Terpenuhi</b>	<b>88%</b>	<b>4.117.073.117</b>
<b>A</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu</b>	<b>152</b>	<b>45.232.000</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4	32.050.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	34	4.480.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dilaksanakan	34	1.640.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan	34	1.882.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang dilaksanakan	34	1.500.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	12	3.680.000
<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik</b>	<b>1</b>	<b>2.917.718.033</b>
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	27	2.917.718.033
<b>C</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang terfasilitasi</b>	<b>27</b>	<b>369.999.000</b>
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	27	369.999.000
<b>D</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah sarana yang layak fungsi</b>	<b>158</b>	<b>285.040.800</b>
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7	2.323.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46	19.060.800
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	62.687.000
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3	12.220.000
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	90	188.750.000
E	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah prasarana yang layak fungsi</b>	<b>26</b>	<b>188.605.600</b>
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	26	188.605.600
F	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan</b>	<b>1010</b>	<b>75.140.184</b>
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	1000	5.389.800
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	7	31.650.384
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	3	38.100.000
G	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Yang Layak Pakai</b>	<b>201</b>	<b>235.337.500</b>
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1	36.071.000
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	4	108.040.500
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	195	25.762.000
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	1	65.464.000
II	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Jumlah Temuan BPK</b>	<b>11</b>	<b>1.217.933.000</b>
		<b>Persentase pelanggaran pegawai</b>	<b>0,16%</b>	<b>149.370.000</b>
H	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Persentase laporan hasil pengawasan internal yang terbit tepat waktu</b>	<b>88%</b>	<b>1.217.933.000</b>
22	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan kinerja yang difasilitasi	44	537.278.000
23	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan keuangan yang difasilitasi	40	413.258.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
24	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah reviu laporan kinerja yang difasilitasi	1	22.145.000
25	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah reviu laporan keuangan yang difasilitasi	1	22.285.000
26	Pengawasan Desa	Jumlah pengawasan desa yang difasilitasi	39	175.065.000
27	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti	94%	47.902.000
I	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu terbit tepat waktu</b>	<b>60%</b>	<b>149.370.000</b>
28	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang difasilitasi	30	149.370.000
III	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal A</b>	<b>80%</b>	<b>1.202.202.000</b>
J	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan</b>	<b>100%</b>	<b>6.987.000</b>
29	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan yang dirumuskan	2	6.987.000
K	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang ditindaklanjuti oleh OPD</b>	<b>80%</b>	<b>1.195.215.000</b>
30	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	4	940.650.000
31	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah pendampingan, verifikasi dan asistensi penilaian Reformasi Birokrasi yang difasilitasi	21	58.890.000
32	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Nilai Capaian Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi KPK	85%	159.760.000
33	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas yang difasilitasi	44	35.915.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022 (setelah perubahan)

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah.

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran

keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Inspektorat Daerah Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	87	86	98,85	Cukup	Laporan Hasil Evaluasi
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Tingkat Kapabilitas APIP	3	3,06	102,00	Sangat Baik	Laporan Hasil Evaluasi
		Tingkat Maturitas SPIP	3,2	3,42	106,72	Sangat Baik	LHE Penilaian Maturitas SPIP

Secara umum, capaian indikator kinerja utama dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Adapun capaian masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

1. Nilai AKIP Inspektorat Daerah dari target 87 dengan realisasi 86 atau capaian 98,85% dengan kategori **Cukup** sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor: 700/67.02/432.200/LHE/2022 tanggal 07 Oktober 2022.
2. Tingkat Kapabilitas APIP dari target level 3 dan realisasi level 3 dengan nilai 3,060 atau sebesar 102,00% dengan kategori **Sangat Baik**. Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Pamekasan tanggal 14 Oktober 2022 dari 6 elemen yang terdapat 5 elemen dengan level 3 dan 1 elemen yang telah mencapai level 4, yaitu elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja.
3. Tingkat Maturitas SPIP dari target level 3 dan realisasi level 3 dengan nilai 3,415 atau sebesar 106,72% dengan kategori **Sangat Baik**. Berdasarkan surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.09.03/LHP-878/PW13/3/2022 tanggal 12 Desember 2022 perihal Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan 3 komponen penilaian, yaitu:

- a. penetapan tujuan;
- b. struktur dan proses; dan
- c. pencapaian tujuan.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja (PK)**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	86,00	86,59	100,69	87	86	98,85
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Tingkat Kapabilitas APIP	2	1	50,00	3	3,06	102,00
		Tingkat Maturitas SPIP	3,1	3,05	98,23	3,2	3,42	106,72

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat persentase capaian tahun 2022 yang mengalami kenaikan, antara lain:

- a. Capaian indikator Tingkat Kapabilitas APIP mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 50,00% menjadi 102,00%.
- b. Capaian indikator Tingkat Maturitas SPIP mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 98,23% menjadi 106,72%.

Selain itu, terdapat capaian kinerja yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu Capaian indikator Nilai AKIP Inspektorat Daerah tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021, yaitu dari 100,69% menjadi 98,85%. Penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan kriteria penilaian evaluasi AKIP, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	86	88	97,73
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Tingkat Kapabilitas APIP	3,06	3,1	98,71
		Tingkat Maturitas SPIP	3,42	3,3	103,48

Kemajuan paling rendah pada indikator Nilai AKIP Inspektorat Daerah yang masih di angka 86, sedangkan target akhir adalah dengan nilai 88. Rendahnya kemajuan ini salah satunya disebabkan oleh perubahan peraturan terkait komponen penilaian evaluasi AKIP.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	86	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Tingkat Kapabilitas APIP	3,06	3	102,00
		Tingkat Maturitas SPIP	3,42	3	113,83

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 bahwa tahun 2024 ditargetkan persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Kapabilitas APIP minimal level 3 dan persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Maturitas SPIP minimal level 3 adalah 100%. Hal ini menjelaskan bahwa standar untuk Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP adalah level 3.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	87	86	98,85	Perubahan komponen/sub komponen evaluasi dalam lembar kerja evaluasi AKIP berdasarkan aturan terbaru	Perbaiki dan penyesuaian dokumen sesuai dengan ketentuan untuk meningkatkan nilai akhir
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Tingkat Kapabilitas APIP	3	3,06	102,00	Asistensi dan pendampingan oleh BPKP yang dilakukan secara intensif dan berkesinambungan	-
		Tingkat Maturitas SPIP	3,2	3,42	106,72	Konsistensi dalam penerapan sistem pengendalian intern di masing-masing SKPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan	-

Keberhasilan/ kegagalan dari tercapainya indikator kinerja sasaran banyak dipengaruhi dari banyak faktor. Salah satu penyebab kegagalan adalah perubahan komponen/ sub komponen dalam kriteria penilaian evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang disesuaikan dengan peraturan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021. Perubahan yang paling mendasar adalah perampangan dari 5 komponen penilaian (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/kegiatan) menjadi 4 komponen penilaian (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal). Selain itu juga, terdapat perubahan bobot penilaian yakni pemenuhan dokumen (20%), Kualitas (30%) dan pemanfaatan (50%).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator kinerja tahun 2022, antara lain:

1. Pelaksanaan asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur secara intensif dan berkesinambungan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan yang didukung oleh kerja sama APIP yang baik.

2. Konsistensi dalam penerapan sistem pengendalian intern di masing-masing perangkat daerah lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	98,85	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Kesekretariatan yang Terpenuhi	100%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	99%	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	125%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	91%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dilaksanakan	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang dilaksanakan	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	100%	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	126%	Menunjang
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	126%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	100%	Menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	100%	Menunjang
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	165%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	164%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	114%	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Layak Pakai	111%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	103%	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	100%	Menunjang
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Tingkat Kapabilitas APIP	102,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jumlah Temuan BPK	91%	Menunjang
					Persentase pelanggaran pegawai	119%	Menunjang
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan hasil pengawasan internal yang terbit tepat waktu	111%	Menunjang
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan kinerja yang difasilitasi	220%	Menunjang
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan keuangan yang difasilitasi	103%	Menunjang
				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah reviu laporan kinerja yang difasilitasi	100%	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah reviu laporan keuangan yang difasilitasi	100%	Menunjang
				Pengawasan Desa	Jumlah pengawasan desa yang difasilitasi	469%	Menunjang
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti	102%	Menunjang
				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu terbit tepat waktu	90%	Menunjang
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang difasilitasi	43%	Menunjang
		Tingkat Maturitas SPIP	106,72	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal A	92%	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan	400%	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan yang dirumuskan	400%	Menunjang
				Pendampingan dan Asistensi	Persentase rekomendasi hasil perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang ditindaklanjuti oleh OPD	100%	Menunjang
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	Menunjang
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah pendampingan, verifikasi dan asistensi penilaian Reformasi Birokrasi yang difasilitasi	100%	Menunjang
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Nilai Capaian Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi KPK	106%	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas yang difasilitasi	100%	Menunjang

Secara umum, capaian indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan telah mencapai 100%, kecuali pada Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator jumlah temuan BPK sebesar 91% dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi sebesar 92%. Target capaian program tidak tercapai dikarenakan:

1. Kurangnya komitmen kepala perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sehingga menjadi temuan berulang;
2. Kompetensi SDM khususnya pengelola keuangan dan aset yang belum memadai;
3. Inkonsistensi dokumen perencanaan karena belum optimalnya revidi dokumen perencanaan oleh perangkat daerah.
4. Terdapat beberapa rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti;
5. Perubahan komponen/ sub komponen dalam kriteria penilaian evaluasi Akuntabilitas Kinerja yakni perampingan dari 5 komponen penilaian (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/kegiatan) menjadi 4 komponen penilaian (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal) dan perubahan bobot penilaian yakni pemenuhan dokumen (20%), Kualitas (30%) dan pemanfaatan (50%).

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.117.073.117</b>	<b>3.719.278.937</b>	<b>90,34%</b>
<b>A</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>45.232.000</b>	<b>33.813.500</b>	<b>74,76%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.050.000	24.639.000	76,88%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.480.000	3.669.500	81,91%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.640.000	1.325.000	80,79%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.882.000	1.422.000	75,56%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.500.000	1.240.000	82,67%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.680.000	1.518.000	41,25%
<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.917.718.033</b>	<b>2.679.562.663</b>	<b>91,84%</b>
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.917.718.033	2.679.562.663	91,84%
<b>C</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>369.999.000</b>	<b>362.374.000</b>	<b>97,94%</b>
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	369.999.000	362.374.000	97,94%
<b>D</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>285.040.800</b>	<b>267.763.834</b>	<b>93,94%</b>
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.323.000	2.129.300	91,66%
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.060.800	18.938.100	99,36%
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.687.000	49.964.000	79,70%
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.220.000	8.270.000	67,68%
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.750.000	188.462.434	99,85%
<b>E</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>188.605.600</b>	<b>176.392.047</b>	<b>93,52%</b>
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	188.605.600	176.392.047	93,52%
<b>F</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>75.140.184</b>	<b>62.855.932</b>	<b>83,65%</b>
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.389.800	4.450.400	82,57%
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.650.384	27.505.532	86,90%
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.100.000	30.900.000	81,10%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
<b>G</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>235.337.500</b>	<b>136.516.961</b>	<b>58,01%</b>
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.071.000	23.372.681	64,80%
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.040.500	68.165.585	63,09%
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.762.000	16.293.961	63,25%
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.464.000	28.684.734	43,82%
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>1.367.303.000</b>	<b>1.166.567.000</b>	<b>85,32%</b>
<b>H</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>1.217.933.000</b>	<b>1.029.811.000</b>	<b>84,55%</b>
22	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	537.278.000	519.564.000	96,70%
23	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	413.258.000	375.464.000	90,85%
24	Reviu Laporan Kinerja	22.145.000	21.831.000	98,58%
25	Reviu Laporan Keuangan	22.285.000	22.115.000	99,24%
26	Pengawasan Desa	175.065.000	75.667.000	43,22%
27	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	47.902.000	15.170.000	31,67%
<b>I</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>149.370.000</b>	<b>136.756.000</b>	<b>91,56%</b>
28	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	149.370.000	136.756.000	91,56%
<b>III</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>1.202.202.000</b>	<b>957.287.264</b>	<b>79,63%</b>
<b>J</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>6.987.000</b>	<b>5.508.000</b>	<b>78,83%</b>
29	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	6.987.000	5.508.000	78,83%
<b>K</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>1.195.215.000</b>	<b>951.779.264</b>	<b>79,63%</b>
30	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	940.650.000	779.413.504	82,86%
31	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	58.890.000	16.434.000	27,91%
32	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	159.760.000	139.281.760	87,18%
33	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	35.915.000	16.650.000	46,36%
<b>Jumlah</b>		<b>6.686.578.117</b>	<b>5.843.133.201</b>	<b>87,39%</b>

### C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	87	86	98,85	4.117.073.117	3.719.278.937	90,34	8,51
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Tingkat Kapabilitas APIP	3	3,06	102,00	1.367.303.000	1.166.567.000	85,32	16,68
		Tingkat Maturitas SPIP	3,2	3,42	106,72	1.202.202.000	957.287.264	79,63	27,09

Dari tabel di atas menginformasikan bahwa secara umum diperoleh efisiensi untuk masing-masing indikator sasaran. Anggaran yang ada telah sepenuhnya mendukung sasaran strategis dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>4.117.073.117</b>	<b>3.719.278.937</b>	<b>90</b>	<b>9,66</b>
<b>A</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>152</b>	<b>150</b>	<b>99</b>	<b>45.232.000</b>	<b>33.813.500</b>	<b>75</b>	<b>23,93</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	5	125	32.050.000	24.639.000	77	48,12
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	34	31	91	4.480.000	3.669.500	82	9,27
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	34	34	100	1.640.000	1.325.000	81	19,21
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	34	34	100	1.882.000	1.422.000	76	24,44
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	34	34	100	1.500.000	1.240.000	83	17,33
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	100	3.680.000	1.518.000	41	58,75
<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>2.917.718.033</b>	<b>2.679.562.663</b>	<b>92</b>	<b>8,16</b>
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27	27	100	2.917.718.033	2.679.562.663	92	8,16
<b>C</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>126</b>	<b>369.999.000</b>	<b>362.374.000</b>	<b>98</b>	<b>27,99</b>

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Esisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27	34	126	369.999.000	362.374.000	98	27,99
<b>D</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>100</b>	<b>285.040.800</b>	<b>267.763.834</b>	<b>94</b>	<b>6,06</b>
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7	7	100	2.323.000	2.129.300	92	8,34
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46	46	100	19.060.800	18.938.100	99	0,64
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	100	62.687.000	49.964.000	80	20,30
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3	3	100	12.220.000	8.270.000	68	32,32
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	90	100	188.750.000	188.462.434	100	0,15
<b>E</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>100</b>	<b>188.605.600</b>	<b>176.392.047</b>	<b>94</b>	<b>6,48</b>
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26	26	100	188.605.600	176.392.047	94	6,48
<b>F</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1010</b>	<b>1664</b>	<b>165</b>	<b>75.140.184</b>	<b>62.855.932</b>	<b>84</b>	<b>81,10</b>
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000	1644	164	5.389.800	4.450.400	83	81,83
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7	8	114	31.650.384	27.505.532	87	27,38
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	3	100	38.100.000	30.900.000	81	18,90
<b>G</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>201</b>	<b>224</b>	<b>111</b>	<b>235.337.500</b>	<b>136.516.961</b>	<b>58</b>	<b>53,43</b>
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	1	100	36.071.000	23.372.681	65	35,20
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	4	100	108.040.500	68.165.585	63	36,91
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	195	200	103	25.762.000	16.293.961	63	39,32
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	100	65.464.000	28.684.734	44	56,18
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>91</b>	<b>1.217.933.000</b>	<b>1.029.811.000</b>	<b>85</b>	<b>6,36</b>
		<b>0,16%</b>	<b>0,13%</b>	<b>119</b>	<b>149.370.000</b>	<b>136.756.000</b>	<b>92</b>	<b>27,19</b>
<b>H</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>88%</b>	<b>97%</b>	<b>111</b>	<b>1.217.933.000</b>	<b>1.029.811.000</b>	<b>85</b>	<b>25,96</b>
22	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	44	97	220	537.278.000	519.564.000	97	123,75
23	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40	41	103	413.258.000	375.464.000	91	11,65
24	Reviu Laporan Kinerja	1	1	100	22.145.000	21.831.000	99	1,42
25	Reviu Laporan Keuangan	1	1	100	22.285.000	22.115.000	99	0,76
26	Pengawasan Desa	39	183	469	175.065.000	75.667.000	43	426,01

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
27	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	94%	96%	102	47.902.000	15.170.000	32	70,41
<b>I</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>60%</b>	<b>54%</b>	<b>90</b>	<b>149.370.000</b>	<b>136.756.000</b>	<b>92</b>	<b>-1,56</b>
28	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30	13	43	149.370.000	136.756.000	92	-48,22
<b>III</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>80%</b>	<b>74%</b>	<b>92</b>	<b>1.202.202.000</b>	<b>957.287.264</b>	<b>80</b>	<b>12,63</b>
<b>J</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>400%</b>	<b>400</b>	<b>6.987.000</b>	<b>5.508.000</b>	<b>79</b>	<b>321,17</b>
29	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	2	8	400	6.987.000	5.508.000	79	321,17
<b>K</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100</b>	<b>1.195.215.000</b>	<b>951.779.264</b>	<b>80</b>	<b>20,60</b>
30	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	100	940.650.000	779.413.504	83	17,14
31	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	21	21	100	58.890.000	16.434.000	28	72,09
32	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	85%	90%	106	159.760.000	139.281.760	87	18,70
33	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	44	44	100	35.915.000	16.650.000	46	53,64

Berdasarkan tabel diatas, terdapat inefisiensi penggunaan sumber daya atas pencapaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu sebesar 1,56%. Kondisi tersebut disebabkan karena bertambahnya jumlah pengaduan masyarakat dan pelimpahan dari aparat penegak hukum yang kurang dilengkapi dengan dokumen pendukung dan tidak diimbangi dengan jumlah SDM APIP.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan antara lain:

1. Pelaksanaan asistensi dan pendampingan telah dilakukan mulai sejak perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, sehingga meminimalkan kesalahan pada pencatatan maupun pertanggungjawaban keuangan.
2. Pelaksanaan *probity audit* mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan.

3. Asistensi secara intens dan berkala dilakukan oleh APIP kepada perangkat daerah yang memiliki tunggakan tindak lanjut, terutama untuk rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya.
4. Monitoring atas rencana aksi tindak lanjut perbaikan dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan nilai AKIP perangkat daerah terutama nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan penyelesaian tindaklanjut.
5. Pelaksanaan Audit kinerja berbasis risiko.
6. Optimaliasi pemberian layanan jasa konsultasi khususnya *Governance Risk Control* (GRC).
7. Usul penambahan SDM APIP baik melalui rekrutmen maupun rotasi;

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022. Pembuatan Laporan Kinerja merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan menetapkan 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu Nilai AKIP Inspektorat Daerah dengan capaian kinerja sebesar 98,85% (kategori Cukup)
- Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu indikator Tingkat Kapabilitas APIP dengan capaian kinerja sebesar 102,00% (kategori Sangat Baik) dan indikator Tingkat Maturitas SPIP dengan capaian kinerja masih dalam proses dengan angka prediksi sebesar 106,72% (kategori Sangat Baik).

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, rata-rata **telah** mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah dalam pencapaian kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan internal disebabkan karena jumlah SDM APIP yang belum memadai;

2. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Perangkat daerah belum menyeluruh dan berjalan baik;
3. Tuntutan peningkatan terhadap Kapabilitas APIP dan Tingkat Kematangan (Maturitas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Temuan yang belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK menjadi temuan berulang.

Sehubungan permasalahan di atas, langkah perbaikan yang perlu dilakukan antara lain:

1. Usul penambahan SDM APIP baik melalui rekrutmen maupun rotasi;
2. Pelaksanaan Audit kinerja berbasis risiko.
3. Pelaksanaan *probity audit* mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan.
4. Optimaliasi pemberian layanan jasa konsultasi khususnya *Governance Risk Control* (GRC).
5. Pelaksanaan asistensi dan pendampingan telah dilakukan mulai sejak perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, sehingga meminimalkan kesalahan pada ..pencatatan maupun pertanggungjawaban keuangan.
6. Asistensi secara intens dan berkala dilakukan oleh APIP kepada perangkat daerah yang memiliki tunggakan tindak lanjut, terutama untuk rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya.
7. Monitoring atas rencana aksi tindak lanjut perbaikan dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan nilai AKIP perangkat daerah terutama nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan penyelesaian tindaklanjut.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.686.578.117,00, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp5.843.133.201,00, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 serapan anggaran sebesar 87,39% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 12,61%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 10 Februari 2023

PL. INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN



**Ipo NURUL WIDIASTUTI**  
Penyuling Utama Muda  
NIP. 19640229 199003 2 005

## Lampiran

1. Matrisk Renstra 2018-2023 dan Perubahannya
2. Dokumen IKU Kepala Perangkat Daerah dan Perubahannya
3. Matriks Renja 2022 dan Perubahannya
4. PK Kepala PD dan Perubahannya
5. Laporan Evaluasi Hasil Renja s.d. TW. IV
6. Penghargaan yang pernah diperoleh oleh perangkat daerah maupun pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya

**TABEL 6.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PERENCANAAN ANGGARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN**  
**TAHUN 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Bagian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target RENSTRA										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp.			
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatkan tata kelola pendukung pelaksanaan layanan urusan organisasi perangkat daerah					Indeks kepuasan unit kerja		88%		89%		90%		91%		92%		92%				
	Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien				Prosentase layanan kesekretariatan yg sesuai SOP		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		3.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Umum dan Kepegawaian	• Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	100%	100%	506.800.000	100%	700.000.000	100%	728.000.000	100%	757.000.000	100%	790.000.000	100%	790.000.000	Sekretaris		
		3.05.01.01.01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Prosentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terfasilitasi		100%	250.000.000	100%	400.000.000	100%	416.000.000	100%	432.000.000	100%	450.000.000	100,00%	450.000.000			
		3.05.01.01.02	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jumlah kebutuhan pendukung pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		6 Pendukung	256.800.000	6 Pendukung	300.000.000	6 Pendukung	312.000.000	6 Pendukung	325.000.000	6 Pendukung	340.000.000	6 Pendukung	340.000.000			
		3.05.01.02	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Umum dan Kepegawaian	• Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi • Persentase PNS yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan yang Sesuai Dengan Tugas yang Menjadi Tanggung	80%	85%	480.000.000	86%	1.200.000.000	87%	640.000.000	88%	1.190.000.000	89%	691.000.000	88%	2.161.000.000			
		3.05.01.02.01	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan layak pakai		1 Unit	25.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000			
		3.05.01.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan layak pakai		3 Unit	80.000.000	6 Unit	150.000.000	5 Unit	156.000.000	6 Unit	162.000.000	7 Unit	168.000.000	7 Unit	168.000.000			
		3.05.01.02.04	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dan layak pakai		6 Item	25.000.000	6 Item	50.000.000	6 Item	52.000.000	6 Item	54.000.000	6 Item	56.000.000	6 Item	56.000.000			
		3.05.01.02.05	Pengadaan peralatan gedung kantor		Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor		4 Item	50.000.000	6 Item	200.000.000	4 Item	208.000.000	4 Item	216.000.000	4 Item	225.000.000	4 Item	225.000.000			
		3.05.01.02.08	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	3 Unit Roda 4 15 Unit Roda 2	1 Unit	250.000.000	4 Unit	550.000.000	2 Unit	70.000.000	2 Unit	600.000.000	2 Unit	80.000.000	11 Unit	1.550.000.000			
		3.05.01.05.22	Pendidikan dan pelatihan formal		Jumlah tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang mengikuti diklat formal dan bersertifikasi		16 Orang	18 Orang	50.000.000	27 Orang	100.000.000	30 Orang	104.000.000	30 Orang	108.000.000	30 Orang	112.000.000	30 Orang	112.000.000		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan					1. Nilai SAKIP; 2. Opini atas laporan keuangan	68,44 (B) (2018)	80,05 (A) WTP	80,12 (A) WTP	81,16 (A) WTP	81,34 (A) WTP	82,1 (A) WTP	82,1 (A) WTP									
	Meningkatnya kualitas Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan perangkat daerah				Prosentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal A	44%	50%		60%	75%	80%	85%									
					Prosentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti																
					APIP		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
					BPK	80%	82%		84%	86%	88%	90%									
					Tingkat kapabilitas APIP	Level 2	Level 3		Level 3 3,2	Level 3 3,5	Level 3 3,6	Level 3 3,8		Level 4		Level 4					
					Tingkat maturitas SPIP	Level 2	Level 3		Level 3 3,2	Level 3 3,5	Level 3 3,6	Level 3 3,8		Level 4		Level 4					
		3.05.01.03	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	• Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	100%	100%	275.000.000	100%	575.000.000	100%	578.000.000	100%	621.000.000	100%	645.000.000	100%	645.000.000	Sekretaris dan IRBANWIL		
		3.05.01.03.01	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun dalam kondisi baik dan benar	5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	32.000.000	5 Dokumen	54.000.000	5 Dokumen	56.000.000	5 Dokumen	56.000.000			
		3.05.01.03.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	26.000.000	2 Dokumen	27.000.000	2 Dokumen	28.000.000	2 Dokumen	28.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Bagian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target RENSTRA										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp.		
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.				
		3.05.01.03.03	Pelaksanaan Revu Laporan Keuangan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Revu (LHR) yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	1 LHR	1 LHR	40.000.000	1 LHR	75.000.000	1 LHR	78.000.000	1 LHR	81.000.000	1 LHR	84.000.000	1 LHR	84.000.000		
		3.05.01.03.04	Pelaksanaan Revu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Pamekasan		Jumlah Laporan Hasil Revu (LHR) yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	1 LHR	1 LHR	40.000.000	1 LHR	75.000.000	1 LHR	78.000.000	1 LHR	81.000.000	1 LHR	84.000.000	1 LHR	84.000.000		
		3.05.01.03.05	Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Pamekasan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	45 LHE	45 LHE	100.000.000	45 LHE	150.000.000	45 LHE	156.000.000	45 LHE	162.000.000	45 LHE	168.000.000	45 LHE	168.000.000		
		3.05.01.03.06	Optimalisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) PMPRB yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	1 LHE	1 LHE	40.000.000	11 LHE	200.000.000	11 LHE	208.000.000	11 LHE	216.000.000	11 LHE	225.000.000	11 LHE	225.000.000		
		3.05.01.03.07	Pengumpulan/ Updating Data Kebutuhan Perencanaan		Jmlh dok laporan data kebutuhan perencanaan yg disusun	-	-	-	-	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000					
		3.05.01.07	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Temuan BPK	16	14	1.456.400.000	13	1.500.000.000	12	1.560.000.000	11	1.622.400.000	10	1.688.000.000	10	1.688.000.000	Sekretaris dan IRBANWIL	
		3.05.01.07.01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengawasan internal yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	75 LHP	90 LHP	1.101.400.000	100 LHP	750.000.000	110 LHP	780.000.000	120 LHP	811.200.000	130 LHP	845.000.000	130 LHP	845.000.000		
		3.05.01.07.02	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan diawahnya		Prosentase kasus dan pengaduan masyarakat yang selesai tertangani tepat waktu	100%	100%	75.000.000	100%	100.000.000	100%	104.000.000	100%	108.160.000	100%	113.000.000	100,00%	113.000.000		
		3.05.01.07.03	Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	4 LHTL	4 LHTL	50.000.000	4 LHTL	75.000.000	4 LHTL	78.000.000	4 LHTL	81.120.000	4 LHTL	84.000.000	4 LHTL	84.000.000		
		3.05.01.07.04	Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)		Jumlah fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)	12 Keg	12 Keg	50.000.000	12 Keg	75.000.000	12 Keg	78.000.000	12 Keg	81.120.000	12 Keg	84.000.000	12 Keg	84.000.000		
		3.05.01.07.05	Pelaksanaan Revu Dokumen Perencanaan		Jumlah Laporan Hasil Revu (LHR) yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	2 LHR	6 LHR	90.000.000	4 LHR	125.000.000	6 LHR	130.000.000	6 LHR	135.200.000	6 LHR	140.000.000	6 LHR	140.000.000		
		3.05.01.07.06	Pelaksanaan Revu Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Barang / Jasa		Jumlah Laporan Hasil Revu (LHR) yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	4 LHR	4 LHR	40.000.000	4 LHR	100.000.000	4 LHR	104.000.000	4 LHR	108.160.000	4 LHR	112.000.000	4 LHR	112.000.000		
		3.05.01.07.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Laporan Hasil Monitoring (LHM) yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	4 LHM	4 LHM	50.000.000	4 LHM	275.000.000	4 LHM	286.000.000	4 LHM	297.440.000	4 LHM	310.000.000	4 LHM	310.000.000		
		3.05.01.08	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Umum dan Kepegawaian	+Prosentase APIP yang bersertifikat Penjenjangan dan teknis substansi pengawasan	65%	80%	275.000.000	85%	500.000.000	85%	600.000.000	88%	750.000.000	90%	750.000.000	90%	750.000.000	Sekretaris dan IRBANWIL	
		3.05.01.08.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		Jumlah tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang mengikuti diklat penjenjangan dan teknis substansi pengawasan	15 Orang	20 Orang	275.000.000	27 Orang	500.000.000	30 Orang	600.000.000	35 Orang	750.000.000	40 Orang	750.000.000	40 Orang	750.000.000		
		3.05.01.09	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	+Persentase pelanggaran pegawai	0,28	0,25%	660.000.000	0,20%	1.700.000.000	0,18%	1.768.000.000	0,16%	1.837.000.000	0,14%	1.909.000.000	0,14%	1.909.000.000	Sekretaris dan IRBANWIL	
		3.05.01.09.02	Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)		Prosentase penyelenggaraan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) yang terfasilitasi	12 Keg	100%	350.000.000	100%	600.000.000	100%	624.000.000	100%	650.000.000	100%	676.000.000	100%	676.000.000		
		3.05.01.09.03	Pelaksanaan evaluasi maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)		Jumlah LHE Maturitas SPIP yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	5 LHE	10 LHE	75.000.000	10 LHE	150.000.000	10 LHE	156.000.000	10 LHE	162.000.000	10 LHE	168.000.000	10 LHE	168.000.000		
		3.05.01.09.04	Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik		Jumlah LHE pelayanan publik yang terbit tepat waktu dan sesuai	5 LHE	5 LHE	50.000.000	10 LHE	100.000.000	5 LHE	104.000.000	5 LHE	108.000.000	5 LHE	112.000.000	5 LHE	112.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Bagian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target RENSTRA										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp.		
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.				
		3.05.01.09.05	Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)		Prosentase penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang terfasilitasi	12 Keg	100%	75.000.000	100%	250.000.000	100%	260.000.000	100%	270.000.000	100%	280.000.000	100%	280.000.000		
		3.05.01.09.06	Pelaksanaan Penilaian Internal Zona Integritas		Jumlah LHE Zona Integritas yang terbit tepat waktu dan sesuai		3 LHE	30.000.000	10 LHE	150.000.000	10 LHE	156.000.000	10 LHE	162.000.000	10 LHE	168.000.000	10 LHE	168.000.000		
		3.05.01.09.07	Penanganan Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan		Prosentase LHE Penanganan Whistle Blower System / Benturan Kepentingan yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman		100%	40.000.000	100%	100.000.000	100%	104.000.000	100%	108.000.000	100%	112.000.000	100,00%	112.000.000		
		3.05.01.09.08	Pelaksanaan Verifikasi LHKPN/LHKASN		Prosentase LHKPN/LHKASN yang diverifikasi sesuai aturan dan tepat waktu		100%	40.000.000	100%	150.000.000	100%	156.000.000	100%	162.000.000	100%	168.000.000	100,00%	168.000.000		
		3.05.01.09.09	Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas		Jumlah LHE Penilaian Integritas yang terbit tepat waktu dan sesuai				1 LHE	200.000.000	1 LHE	208.000.000	1 LHE	215.000.000	1 LHE	225.000.000	1 LHE	225.000.000		

Pamekasan, 10 Desember 2018

Pt. INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. BUDI SUPRAPTO, M. Si  
NIP. 19610412 199003 1 011

**MATRIKS PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021-2023**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH**  
**KABUPATEN PAMEKASAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Sebelum Perubahan</b>												
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan				1. Nilai SAKIP;	81,34 (A)		82,1 (A)		82,1 (A)			
	Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien			2. Opini atas laporan keuangan	WTP		WTP		WTP			
		3 05 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	100%	506.800.000	100%	506.800.000	100%	2.534.000.000	Sekretaris	
		3 05 01 01 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prosentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terfasilitasi	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.250.000.000	Subbag. Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pamekasan
		3 05 01 01 02	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah kebutuhan pendukung pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	6 Pendukung	256.800.000	6 Pendukung	256.800.000	6 Pendukung	1.284.000.000	Subbag. Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pamekasan
		3 05 01 02	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	• Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	89%	225.491.250	1	233.015.813	90%	1.068.332.063	Sekretaris	
		3 05 01 02 01	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan layak pakai	1 Unit	30.491.250	1 Unit	35.000.000	1 Unit	145.816.250	Subbag. Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pamekasan
		3 05 01 02 02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan layak pakai	6 Unit	70.000.000	7 Unit	73.015.813	7 Unit	330.515.813	Subbag. Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pamekasan
		3 05 01 02 03	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	7 Unit	100.000.000	Subbag. Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pamekasan
		3 05 01 02 04	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dan layak pakai	6 Item	30.000.000	6 Item	30.000.000	6 Item	142.000.000	Subbag. Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pamekasan
		3 05 01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	4 Item	75.000.000	4 Item	75.000.000	4 Item	350.000.000	Subbag. Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pamekasan
		3 05 01 02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	90%	58.000.000	95%	60.900.000	95	276.525.000	Sekretaris	
		3 05 01 03 22	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang mengikuti diklat formal dan bersertifikasi	30 Orang	58.000.000	30 Orang	60.900.000	30 Orang	276.525.000	Subbag. Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pamekasan
	Meningkatnya kualitas Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan perangkat daerah			Prosentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal A	80%		85%		85%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
					Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.						
1	2	3			4	5	13	14	15	16	17	18	19	20		
		3	05	01	03	<b>Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan</b>	<b>• Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik</b>	100%	307.072.000	100%	317.528.000	100%	1.475.000.000	Sekretaris		
		3	05	01	03	01	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun dalam kondisi baik dan benar	5 Dokumen	54.000.000	5 Dokumen	56.000.000	5 Dokumen	232.000.000	Subbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Pamekasan
		3	05	01	03	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	2 Dokumen	27.000.000	2 Dokumen	28.000.000	2 Dokumen	121.000.000	Subbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Pamekasan
		3	05	01	03	03	Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	1 LHR	42.436.000	1 LHR	44.000.000	1 LHR	207.636.000	Subbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Pamekasan
		3	05	01	03	04	Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Pamekasan	Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	1 LHR	42.436.000	1 LHR	44.000.000	1 LHR	207.636.000	Subbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Pamekasan
		3	05	01	03	05	Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Pamekasan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	45 LHE	100.000.000	45 LHE	103.000.000	45 LHE	503.000.000	Subbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Pamekasan
		3	05	01	03	06	Optimalisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) PMPRB yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	1 LHE	41.200.000	1 LHE	42.528.000	1 LHE	203.728.000	Subbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Pamekasan
							<b>Prosentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti</b>									
							<b>1. APIP</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>				
							<b>2. BPK</b>	<b>88%</b>		<b>90%</b>		<b>90%</b>				
		3	05	01	07	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	<b>Jumlah Temuan BPK</b>	11	1.210.956.875	10	1.231.504.719	10	6.262.999.094	Sekretaris dan IRBANWIL		
		3	05	01	07	01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengawasan internal yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	120 LHP	700.000.000	130 LHP	716.504.719	130 LHP	3.917.904.719	Subbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Pamekasan
		3	05	01	07	02	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Prosentase kasus dan pengaduan masyarakat yang selesai tertangani tepat waktu	100%	83.200.000	100%	85.000.000	100,00%	403.200.000	Subbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Pamekasan
		3	05	01	07	03	Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	4 LHTL	57.756.875	4 LHTL	60.000.000	4 LHTL	274.644.375	Subbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Pamekasan
		3	05	01	07	04	Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	Jumlah fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	12 Keg	50.000.000	12 Keg	50.000.000	12 Keg	200.000.000	Subbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Pamekasan
		3	05	01	07	05	Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	6 LHR	100.000.000	6 LHR	100.000.000	6 LHR	480.000.000	Subbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
					Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.						
1	2	3			4	5	13	14	15	16	17	18	19	20		
		3	05	01	07	06	Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang / Jasa	Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	4 LHR	45.000.000	4 LHR	45.000.000	4 LHR	214.000.000	Subbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Pamekasan
		3	05	01	07	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring (LHM) yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	4 LHM	100.000.000	4 LHM	100.000.000	4 LHM	450.000.000	Subbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Pamekasan
		3	05	01	07	08	Pengadaan / Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Hasil pengawasan	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Hasil pengawasan yang disediakan / Dikembangkan	1 Aplikasi	75.000.000	1 Aplikasi	75.000.000	1 Aplikasi	323.250.000	Subbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Pamekasan
							Tingkat kapabilitas APIP		Level 3 3,8		Level 4		Level 4			
		3	05	01	08		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	•Prosentase APIP yang bersertifikat Penjenjangan dan teknis substansi pengawasan	88%	318.346.875	90%	334.264.219	90%	1.519.548.594	Sekretaris	
		3	05	01	08	01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang mengikuti diklat penjenjangan dan teknis substansi pengawasan	35 Orang	318.346.875	40 Orang	334.264.218,75	40 Orang	1.519.548.594	Subbag. Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pamekasan
							Tingkat maturitas SPIP		Level 3 3,8		Level 4		Level 4			
		3	05	01	09		Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	• Persentase pelanggaran pegawai	0,16%	890.192.649	0,14%	932.202.281	0,14%	4.144.657.905	Sekretaris dan IRBANWIL	
		3	05	01	09	02	Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)	Prosentase penyelenggaraan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) yang terfasilitasi	100%	520.000.000	100%	545.000.000	100%	2.380.000.000	Subbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Pamekasan
		3	05	01	09	03	Pelaksanaan evaluasi maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Jumlah LHE Maturitas SPIP yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	10 LHE	80.000.000	10 LHE	85.000.000	10 LHE	387.079.500	Subbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Pamekasan
		3	05	01	09	04	Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah LHE pelayanan publik yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	5 LHE	65.000.000	5 LHE	67.202.281	5 LHE	307.202.281	Subbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Pamekasan
		3	05	01	09	05	Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Prosentase penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang terfasilitasi	100%	87.500.000	100%	93.000.000	100%	420.500.000	Subbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Pamekasan
		3	05	01	09	06	Pelaksanaan Penilaian Internal Zona Integritas	Jumlah LHE Zona Integritas yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	3 LHE	47.692.649	3 LHE	50.000.000	3 LHE	217.876.124	Subbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Pamekasan
		3	05	01	09	07	Penanganan Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	Prosentase LHE Penanganan Whistle Blower System / Benturan Kepentingan yang terbit tepat waktu dan sesuai pedoman	100%	45.000.000	100%	46.000.000	100,00%	216.000.000	Subbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Pamekasan
		3	05	01	09	08	Pelaksanaan LHKPN/LHKASN Verifikasi	Prosentase LHKPN/LHKASN yang diverifikasi sesuai aturan dan tepat waktu	100%	45.000.000	100%	46.000.000	100,00%	216.000.000	Subbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Setelah Perubahan</b>												
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Melalui Penguatan Pengawasan				1. Nilai SAKIP;	81,34 (A)		82,1 (A)					
				2. Opini BPK	WTP		WTP					
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				Nilai AKIP Inspektorat Daerah	87		88 %					
		6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Kesekretariatan yang Terpenuhi	88%	3.975.366.900	90%	5.591.729.680	90%	5.591.729.680	Sekretaris	
		6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	152	54.350.000	184	58.857.000	184	152.587.000	Subbagian Perencanaan	
		6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4	40.750.000	4	44.825.000	4	113.275.000	Subbagian Perencanaan	Kabupaten Pamekasan
		6 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	34	4.480.000	42	4.000.000	42	10.880.000	Subbagian Perencanaan	Kabupaten Pamekasan
		6 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dilaksanakan	34	1.640.000	42	1.804.000	42	5.244.000	Subbagian Perencanaan	Kabupaten Pamekasan
		6 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan	34	2.300.000	42	2.530.000	42	7.130.000	Subbagian Perencanaan	Kabupaten Pamekasan
		6 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang dilaksanakan	34	1.500.000	42	1.650.000	42	4.650.000	Subbagian Perencanaan	Kabupaten Pamekasan
		6 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	12	3.680.000	12	4.048.000	12	11.408.000	Subbagian Perencanaan	Kabupaten Pamekasan
		6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1	2.800.506.866	1	3.500.000.000	1	8.308.554.738	Subbagian Analisis dan Evaluasi	
		6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	27	2.800.506.866	33	3.500.000.000	33	8.308.554.738	Subbagian Analisis dan Evaluasi	Kabupaten Pamekasan
		6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	27	336.930.000	33	645.000.000	33	645.000.000	Subbagian Analisis dan Evaluasi	
		6 1 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang mendapatkan P	0	-	33	45.000.000	33	45.000.000	Subbagian Analisis dan Evaluasi	Kabupaten Pamekasan
		6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	27	336.930.000	33	600.000.000	33	600.000.000	Subbagian Analisis dan Evaluasi	Kabupaten Pamekasan
		6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	158	270.922.800	216	447.625.000	216	468.387.500	Subbagian Analisis dan Evaluasi	

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
								Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
								target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
1	2	3				4	5	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7	2.323.000	10	15.000.000	10	15.000.000	Subbagian Analisis dan Evaluasi	Kabupaten Pamekasan
		6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46	19.060.800	60	80.000.000	60	80.000.000	Subbagian Analisis dan Evaluasi	Kabupaten Pamekasan
		6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	48.569.000	18	85.000.000	18	85.000.000	Subbagian Analisis dan Evaluasi	Kabupaten Pamekasan
		6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3	12.220.000	4	25.000.000	4	25.000.000	Subbagian Analisis dan Evaluasi	Kabupaten Pamekasan
		6	01	01	2.06	09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi	0	-	24	35.000.000	24	35.000.000	Subbagian Analisis dan Evaluasi	Kabupaten Pamekasan
		6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	90	188.750.000	100	207.625.000	100	228.387.500	Subbagian Analisis dan Evaluasi	Kabupaten Pamekasan
		6	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah prasarana yang layak fungsi</b>	<b>26</b>	<b>188.605.600</b>	<b>13</b>	<b>545.000.000</b>	<b>11</b>	<b>545.000.000</b>	<b>Subbagian Analisis dan Evaluasi</b>	
		6	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0	-	1	350.000.000	1	350.000.000	Subbagian Analisis dan Evaluasi	Kabupaten Pamekasan
		6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	0	-	2	70.000.000	2	70.000.000	Subbagian Analisis dan Evaluasi	Kabupaten Pamekasan
		6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	26	188.605.600	10	125.000.000	8	125.000.000	Subbagian Analisis dan Evaluasi	Kabupaten Pamekasan
		6	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan</b>	<b>1010</b>	<b>91.978.600</b>	<b>1010</b>	<b>110.247.680</b>	<b>1010</b>	<b>110.247.680</b>	<b>Subbagian Analisis dan Evaluasi</b>	
		6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	1000	5.389.800	1000	15.000.000	1000	15.000.000	Subbagian Analisis dan Evaluasi	Kabupaten Pamekasan
		6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	7	31.688.800	7	34.857.680	7	34.857.680	Subbagian Analisis dan Evaluasi	Kabupaten Pamekasan
		6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	3	54.900.000	3	60.390.000	3	60.390.000	Subbagian Analisis dan Evaluasi	Kabupaten Pamekasan
		6	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Yang Layak Pakai</b>	<b>201</b>	<b>232.073.034</b>	<b>229</b>	<b>285.000.000</b>	<b>229</b>	<b>285.000.000</b>	<b>Subbagian Analisis dan Evaluasi</b>	
		6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1	36.071.000	1	45.000.000	1	45.000.000	Subbagian Analisis dan Evaluasi	Kabupaten Pamekasan
		6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	4	108.040.500	6	80.000.000	6	80.000.000	Subbagian Analisis dan Evaluasi	Kabupaten Pamekasan
		6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	195	25.762.000	221	60.000.000	221	60.000.000	Subbagian Analisis dan Evaluasi	Kabupaten Pamekasan
		6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	1	62.199.534	1	100.000.000	1	100.000.000	Subbagian Analisis dan Evaluasi	Kabupaten Pamekasan
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal						Kapabilitas APIP		3	1.611.310.000	3,1	2.970.300.000	3,1	2.970.300.000		
		6	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Jumlah Temuan BPK</b>	<b>11</b>	<b>1.254.510.000</b>	<b>10</b>	<b>2.420.300.000</b>	<b>10</b>	<b>2.420.300.000</b>	<b>SEKRETARIS &amp; IRBANWIL</b>	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
					Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.						
1	2	3			4	5	13	14	15	16	17	18	19	20		
		6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan hasil pengawasan internal yang terbit tepat waktu	88%	1.254.510.000	90 %	2.420.300.000	90 %	2.420.300.000	Subbagian Perencanaan, Subbagian Analisis dan Evaluasi		
		6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan kinerja yang difasilitasi	44	200.000.000	45	500.000.000	45	500.000.000	Subbagian Perencanaan	Kabupaten Pamekasan
		6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan keuangan yang difasilitasi	40	678.000.000	60	1.250.000.000	60	1.250.000.000	Subbagian Perencanaan	Kabupaten Pamekasan
		6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah reviu laporan kinerja yang difasilitasi	1	35.250.000	1	60.000.000	1	60.000.000	Subbagian Perencanaan	Kabupaten Pamekasan
		6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah reviu laporan keuangan yang difasilitasi	1	31.160.000	1	60.000.000	1	60.000.000	Subbagian Perencanaan	Kabupaten Pamekasan
		6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah pengawasan desa yang difasilitasi	39	273.000.000	45	300.300.000	45	300.300.000	Subbagian Perencanaan	Kabupaten Pamekasan
		6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kerjasama pengawasan internal yang difasilitasi	0	-	4	150.000.000	4	150.000.000	Subbagian Perencanaan	Kabupaten Pamekasan
		6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti	94%	37.100.000	95%	100.000.000	95%	100.000.000	Subbagian Analisis dan Evaluasi	Kabupaten Pamekasan
							Persentase pelanggaran pegawai	0,16%	356.800.000	0,14%	550.000.000	0,14%	550.000.000	SEKRETARIS & IRBANWIL V		
		6	01	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu terbit tepat waktu	60%	356.800.000	65 %	550.000.000	65 %	550.000.000	Subbagian Perencanaan		
		6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah penanganan penyelesaian kerugian negara atau daerah yang ditindaklanjuti	2	35.500.000	4	150.000.000	4	150.000.000	Subbagian Perencanaan	Kabupaten Pamekasan
		6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang difasilitasi	30	321.300.000	35	400.000.000	35	400.000.000	Subbagian Perencanaan	Kabupaten Pamekasan
							Maturitas SPIP	3,2	3.506.287.000	3,3	5.639.140.000	3,3	5.639.140.000			
		6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal A	80%	3.506.287.000	85%	5.639.140.000	85%	5.639.140.000	SEKRETARIS & IRBANWIL		
		6	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan	100%	56.987.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	Subbagian Perencanaan		
		6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan yang dirumuskan	2	56.987.000	2	50.000.000	2	50.000.000	Subbagian Perencanaan	Kabupaten Pamekasan
		6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang dirumuskan	0	-	1	75.000.000	1	75.000.000	Subbagian Perencanaan	Kabupaten Pamekasan
		6	01	03	2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Rekomendasi Hasil pendampingan dan asistensi yang ditindaklanjuti	80%	3.449.300.000	85%	5.514.140.000	85%	5.514.140.000	Subbagian Perencanaan		
		6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	4	1.950.200.000	12	3.500.000.000	12	3.500.000.000	Subbagian Perencanaan	Kabupaten Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
					Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.						
1	2	3		4	5	13	14	15	16	17	18	19	20			
		6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah pendampingan, verifikasi dan asistensi penilaian Reformasi Birokrasi yang difasilitasi	21	405.700.000	43	811.400.000	43	811.400.000	Subbagian Perencanaan	Kabupaten Pamekasan
		6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Nilai Capaian Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi KPK	85%	645.200.000	90%	709.720.000	90%	709.720.000	Subbagian Perencanaan	Kabupaten Pamekasan
		6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas yang difasilitasi	44	448.200.000	44	493.020.000	44	493.020.000	Subbagian Perencanaan	Kabupaten Pamekasan

NB: Disajikan Tujuan dan Sasaran sebelum dan setelah Perubahan

Pamekasan, 01 Maret 2022



H. MOHAMAD ALWI, S.Sos, M.Si, CGCAE  
NIP. 19680105 198809 1 003



# PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

## INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jokotole No. 143 Telp. ( 0324 ) 322613 Pamekasan

### KEPUTUSAN

#### INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 050 / 07 / 432.200 / 2021

#### TENTANG

#### PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2021 - 2023

#### INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,

- Menimbang** : Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dipandang perlu melakukan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan dengan Keputusan Inspektur Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

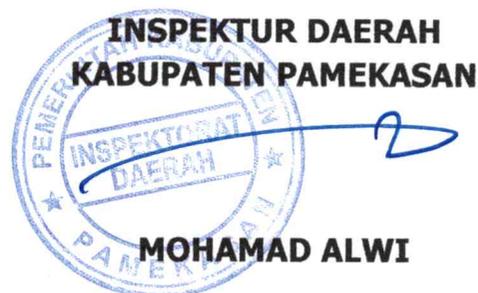
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 – 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.  
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup Indikator Kinerja Utama dapat dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada tanggal : 4 Januari 2021

**INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN**



**MOHAMAD ALWI**

Lampiran Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pamekasan  
Nomor : 050 / 07 / 432.200/2021  
Tanggal : 4 Januari 2021

---

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Instansi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan
2. Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Melalui Penguatan Pengawasan
3. Tugas : membantu bupati dalam membina dan mengawasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah
4. Fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati sebagai wakil Pemerintah Pusat;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Melalui Penguatan Pengawasan	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi (LHE)	Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Pernyataan BPK Atas Laporan Keuangan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Inspektur Pembantu Wilayah

<b>Kinerja Utama</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Penjelasan/Formulasi Penghitungan</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Tingkat Kapabilitas APIP;	Level APIP	Laporan Hasil Evaluasi	Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah
	Tingkat Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP	LHE Penilaian Maturitas SPIP	Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi (LHE)	Sekretaris

Pamekasan, 4 Januari 2021

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN



**MOHAMAD ALWI**



# PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

## INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jokotole No. 143 Telp. ( 0324 ) 322613 Pamekasan

### KEPUTUSAN

#### INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 188 / 18 / 432.200 / 2022

### TENTANG

#### PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

#### INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan rencana aksi hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan dengan Keputusan Inspektorat Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2010-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
Pertama : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : IKU sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama merupakan acuan yang digunakan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Pamekasan.
- Ketiga : Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada tanggal : 01 November 2022

**INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN**



**MOHAMAD ALWI**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

1. Instansi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan
2. Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Melalui Penguatan Pengawasan
3. Tugas : membantu bupati dalam membina dan mengawasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah
4. Fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati sebagai wakil Pemerintah Pusat;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

<b>Kinerja Utama</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Penjelasan/Formulasi Penghitungan</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Tingkat Kapabilitas APIP;	Penilaian kapabilitas APIP dengan komponen yang terdiri dari 6 elemen dengan masing-masing bobot nilai, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan SDM (18%)</li> <li>2. Praktik profesional (18%)</li> <li>3. Akuntabilitas dan manajemen kinerja (6%)</li> <li>4. Budaya dan hubungan organisasi (6%)</li> <li>5. Struktur tata kelola (12%)</li> <li>6. Peran dan layanan APIP (40%)</li> </ol> Penilaian kapabilitas APIP akan menghasilkan level kapabilitas	Laporan Hasil Evaluasi kapabilitas APIP BPKP	Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		APIP dari Level 1 s.d. Level 5: 1. Optimized (Level 5) 2. Institutionalized (Level 4) 3. Delivered (Level 3) 4. Struktured (Level 2) 5. Initial (Level 1)		
	Tingkat Maturitas SPIP	Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi pembobotan pada 3 komponen, yaitu: 1. Penetapan tujuan 2. Struktur dan proses 3. Pencapaian tujuan Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang dengan interval: 1. Rintisan ( $1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$ ) 2. Berkembang ( $2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$ ) 3. Terdefinisi ( $3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$ ) 4. Terkelola dan Terukur ( $4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$ ) 5. Optimum ( $\text{skor} \geq 4,50$ )	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP BPKP	Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Evaluasi dilakukan komponen manajemen kinerja yang meliputi 4 komponen yang dituangkan dalam lembar kerja evaluasi, yaitu: 1. Perencanaan kinerja 2. Pengukuran kinerja 3. Pelaporan kinerja 4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal Nilai akhir penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dengan kategori: 1. AA (nilai > 90-100) 2. A (nilai > 80-90) 3. BB (nilai > 70-80) 4. B (nilai > 60-70)	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah	Sekretaris

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		5. CC (nilai > 50-60) 6. C (nilai > 30-50) 7. D (nilai > 0-30)		

Pamekasan, 01 November 2022



**Tabel T-C.33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
6	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>													
6	1				9.092.963.900				14.386.039.680					
6	1	1			3.975.366.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	5.591.729.680					
6	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Kabupaten Pamekasan		152	54.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		184	58.857.000	
6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Kabupaten Pamekasan		4	40.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	44.825.000
6	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	Kabupaten Pamekasan		34	4.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		42	4.000.000
6	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dilaksanakan	Kabupaten Pamekasan		34	1.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		42	1.804.000
6	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan	Kabupaten Pamekasan		34	2.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		42	2.530.000
6	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang dilaksanakan	Kabupaten Pamekasan		34	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		42	1.650.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6.1.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	Kabupaten Pamekasan	12	3.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	4.048.000
6.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Kabupaten Pamekasan	1	2.800.506.866	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	3.500.000.000
6.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	Kabupaten Pamekasan	27	2.800.506.866	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33	3.500.000.000
6.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	Kabupaten Pamekasan	27	336.930.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33	645.000.000
6.1.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	Kabupaten Pamekasan	0	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33	45.000.000
6.1.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Kabupaten Pamekasan	27	336.930.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33	600.000.000
6.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Kabupaten Pamekasan	158	270.922.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		216	447.625.000
6.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	7	2.323.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10	15.000.000
6.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Pamekasan	46	19.060.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60	80.000.000
6.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Pamekasan	12	48.569.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18	85.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	3	12.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	25.000.000
6	1	1	2.06	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	Kabupaten Pamekasan	0	-			24	35.000.000
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan	90	188.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	207.625.000
6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Kabupaten Pamekasan	26	188.605.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10	<b>545.000.000</b>
6	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	0	-			1	350.000.000
6	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Kabupaten Pamekasan	0	-			2	70.000.000
6	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Kabupaten Pamekasan	26	188.605.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10	125.000.000
6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	1010	91.978.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1010	110.247.680
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	1000	5.389.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1000	15.000.000
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	Kabupaten Pamekasan	7	31.688.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7	34.857.680
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	3	54.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3	60.390.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
6	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Layak Pakai	Kabupaten Pamekasan	201	232.073.034	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		229	285.000.000	
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Pamekasan	1	36.071.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	45.000.000	
6	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pamekasan	4	108.040.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6	80.000.000	
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pamekasan	195	25.762.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		221	60.000.000	
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pamekasan	1	62.199.534	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	100.000.000	
6	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Jumlah Temuan BPK</b>	<b>Kabupaten Pamekasan</b>	<b>11</b>	<b>1.254.510.000</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>90%</b>	<b>2.970.300.000</b>
					<b>Persentase pelanggaran pegawai</b>		<b>0,16%</b>	<b>356.800.000</b>			<b>0,14%</b>	<b>550.000.000</b>	
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten Pamekasan	88%	1.254.510.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90 %	2.420.300.000	
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Pamekasan	44	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45	500.000.000	
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pamekasan	40	678.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60	1.250.000.000	
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Pamekasan	1	35.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	60.000.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah reviu laporan keuangan yang difasilitasi	Kabupaten Pamekasan	1	31.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	60.000.000
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah pengawasan desa yang difasilitasi	Kabupaten Pamekasan	39	273.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45	300.300.000
6	1	2	2.01	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kerjasama pengawasan internal yang difasilitasi	Kabupaten Pamekasan	4	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	150.000.000
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti	Kabupaten Pamekasan	94%	37.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		95%	100.000.000
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Kabupaten Pamekasan	60%	356.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		65 %	550.000.000
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah penanganan penyelesaian kerugian negara atau daerah yang ditindaklanjuti	Kabupaten Pamekasan	2	35.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	150.000.000
6	1	2	2.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang difasilitasi	Kabupaten Pamekasan	30	321.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35	400.000.000
6	1	3			<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal A</b>	<b>Kabupaten Pamekasan</b>	<b>80%</b>	<b>3.506.287.000</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>85%</b>	<b>5.274.010.000</b>
6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan	Kabupaten Pamekasan	100%	56.987.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	125.000.000
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan yang dirumuskan	Kabupaten Pamekasan	2	56.987.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	50.000.000
6	1	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	Kabupaten Pamekasan	0	-			1	75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6.1.3.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Rekomendasi Hasil pendampingan dan asistensi yang ditindaklanjuti	Kabupaten Pamekasan	80%	3.449.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85%	5.149.010.000
6.1.3.2.02.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kabupaten Pamekasan	4	1.950.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	3.500.000.000
6.1.3.2.02.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah pendampingan, verifikasi dan asistensi penilaian Reformasi Birokrasi yang difasilitasi	Kabupaten Pamekasan	21	405.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		43	446.270.000
6.1.3.2.02.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Nilai Capaian Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi KPK	Kabupaten Pamekasan	85%	645.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	709.720.000
6.1.3.2.02.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas yang difasilitasi	Kabupaten Pamekasan	44	448.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		44	493.020.000

Pamekasan, 19 Juli 2021

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN

INSPEKTORAT DAERAH

M. MOHAMAD ALWI, S.Sos, M.Si  
NIP. 19680105 198809 1 003

**Matriks Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022  
Kabupaten Pamekasan**

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah

Kode				SEBELUM					SESUDAH					Tambah / Kurang	Catatan Penting
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
6	1	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Pamekasan	Persentase Layanan Kesekretariatan yang Terpenuhi	88%	3.976.529.450	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Pamekasan	Persentase Layanan Kesekretariatan yang Terpenuhi	88%	4.117.073.117	140.543.667	
6	1	1	2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kab. Pamekasan	<i>Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu</i>	152	54.350.000	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kab. Pamekasan	<i>Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu</i>	152	45.232.000	(9.118.000)	
6	1	1	2.01	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pamekasan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4	40.750.000	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pamekasan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4	32.050.000	(8.700.000)	
6	1	1	2.01	2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pamekasan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	34	4.480.000	2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pamekasan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	34	4.480.000	-	
6	1	1	2.01	3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pamekasan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dilaksanakan	34	1.640.000	3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pamekasan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dilaksanakan	34	1.640.000	-	
6	1	1	2.01	4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pamekasan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan	34	2.300.000	4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pamekasan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan	34	1.882.000	(418.000)	
6	1	1	2.01	5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pamekasan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang dilaksanakan	34	1.500.000	5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pamekasan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang dilaksanakan	34	1.500.000	-	
6	1	1	2.01	6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pamekasan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	12	3.680.000	6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pamekasan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	12	3.680.000	-	
6	1	1	2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Kab. Pamekasan	<i>Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik</i>	1	2.800.506.866	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Kab. Pamekasan	<i>Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik</i>	1	2.917.718.033	117.211.167	
6	1	1	2.02	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pamekasan	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	27	2.800.506.866	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pamekasan	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	27	2.917.718.033	117.211.167	
6	1	1	2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Kab. Pamekasan	<i>Jumlah ASN yang terfasilitasi</i>	27	336.930.000	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Kab. Pamekasan	<i>Jumlah ASN yang terfasilitasi</i>	27	369.999.000	33.069.000	
6	1	1	2.05	2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pamekasan	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	0	-	2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pamekasan	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	0	-	-	
6	1	1	2.05	9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pamekasan	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	27	336.930.000	9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pamekasan	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	27	369.999.000	33.069.000	Indikator lanjut hasil verifikasi KPK atas ketersediaan anggaran diklat APIP yang kurang memadai
6	1	1	2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Kab. Pamekasan	<i>Jumlah sarana yang layak fungsi</i>	158	270.922.800	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Kab. Pamekasan	<i>Jumlah sarana yang layak fungsi</i>	158	285.040.800	14.118.000	
6	1	1	2.06	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pamekasan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7	2.323.000	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Pamekasan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7	2.323.000	-	
6	1	1	2.06	2) Penyediaan Peralatan dan	Kab. Pamekasan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	46	19.060.800	2) Penyediaan Peralatan dan	Kab. Pamekasan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	46	19.060.800	-	
6	1	1	2.06	4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pamekasan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	48.569.000	4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pamekasan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	62.687.000	14.118.000	
6	1	1	2.06	5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pamekasan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3	12.220.000	5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pamekasan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3	12.220.000	-	
6	1	1	2.06	6) Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Pamekasan	Jumlah kunjungan tamu	0	-	6) Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Pamekasan	Jumlah kunjungan tamu	0	-	-	
6	1	1	2.06	9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pamekasan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	90	188.750.000	9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pamekasan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	90	188.750.000	-	Jumlah sisa anggaran kas yang kurang memadai
6	1	1	2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Kab. Pamekasan	<i>Jumlah prasarana yang layak fungsi</i>	26	188.605.600	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Kab. Pamekasan	<i>Jumlah prasarana yang layak fungsi</i>	26	188.605.600	-	

Kode	SEBELUM						SESUDAH					Tambah / Kurang	Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)					
6	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pamekasan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pamekasan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0	-	-
6	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pamekasan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	0	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pamekasan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	0	-	-
6	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pamekasan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	26	188.605.600	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pamekasan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	26	188.605.600	-
6	1	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Pamekasan</b>	<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan</b>	<b>1010</b>	<b>93.140.184</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Pamekasan</b>	<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan</b>	<b>1010</b>	<b>75.140.184</b>	<b>(18.000.000)</b>
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pamekasan	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	1000	5.389.800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pamekasan	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	1000	5.389.800	-
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pamekasan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	7	31.650.384	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pamekasan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	7	31.650.384	-
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pamekasan	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	3	56.100.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pamekasan	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	3	38.100.000	(18.000.000)
6	1	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Pamekasan</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Yang Layak Pakai</b>	<b>201</b>	<b>232.074.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Pamekasan</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Yang Layak Pakai</b>	<b>201</b>	<b>235.337.500</b>	<b>3.263.500</b>
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pamekasan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1	36.071.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pamekasan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1	36.071.000	-
6	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pamekasan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	4	108.040.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pamekasan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	4	108.040.500	-
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pamekasan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	195	25.762.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pamekasan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	195	25.762.000	-
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pamekasan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	1	62.200.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pamekasan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	1	65.464.000	3.263.500
6	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Kab. Pamekasan</b>	<b>Jumlah Temuan BPK</b>	<b>11</b>	<b>1.293.183.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Kab. Pamekasan</b>	<b>Jumlah Temuan BPK</b>	<b>11</b>	<b>1.217.933.000</b>	<b>(75.250.000)</b>
							<b>Persentase pelanggaran pegawai</b>	<b>0,16%</b>	<b>283.420.000</b>			<b>Persentase pelanggaran pegawai</b>	<b>0,16%</b>	<b>149.370.000</b>	<b>(134.050.000)</b>
6	1	2	2.01		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Kab. Pamekasan</b>	<b>Persentase laporan hasil pengawasan internal yang terbit tepat waktu</b>	<b>88%</b>	<b>1.293.183.000</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Kab. Pamekasan</b>	<b>Persentase laporan hasil pengawasan internal yang terbit tepat waktu</b>	<b>88%</b>	<b>1.217.933.000</b>	<b>(75.250.000)</b>
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Pamekasan	Jumlah pengawasan kinerja yang difasilitasi	44	615.678.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Pamekasan	Jumlah pengawasan kinerja yang difasilitasi	44	537.278.000	(78.400.000)
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Pamekasan	Jumlah pengawasan keuangan yang difasilitasi	40	448.538.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Pamekasan	Jumlah pengawasan keuangan yang difasilitasi	40	413.258.000	(35.280.000)
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Pamekasan	Jumlah reviu laporan kinerja yang difasilitasi	1	35.250.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Pamekasan	Jumlah reviu laporan kinerja yang difasilitasi	1	22.145.000	(13.105.000)
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Pamekasan	Jumlah reviu laporan keuangan yang difasilitasi	1	30.850.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Pamekasan	Jumlah reviu laporan keuangan yang difasilitasi	1	22.285.000	(8.565.000)
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Kab. Pamekasan	Jumlah pengawasan desa yang difasilitasi	39	127.595.000	Pengawasan Desa	Kab. Pamekasan	Jumlah pengawasan desa yang difasilitasi	39	175.065.000	47.470.000
6	1	2	2.01	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Pamekasan	Jumlah kerjasama pengawasan internal yang difasilitasi	4	-	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Pamekasan	Jumlah kerjasama pengawasan internal yang difasilitasi	4	-	-
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Pamekasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti	94%	35.272.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Pamekasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti	94%	47.902.000	12.630.000
6	1	2	2.02		<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Kab. Pamekasan</b>	<b>Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu</b>	<b>60%</b>	<b>283.420.000</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Kab. Pamekasan</b>	<b>Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu</b>	<b>60%</b>	<b>149.370.000</b>	<b>(134.050.000)</b>

Kode	SEBELUM					SESUDAH					Tambah / Kurang	Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
6 1 2 2.02 1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Pamekasan	Jumlah penanganan penyelesaian kerugian negara atau daerah yang ditindaklanjuti	2	33.820.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Pamekasan	Jumlah penanganan penyelesaian kerugian negara atau daerah yang ditindaklanjuti	2	0	(33.820.000)	
6 1 2 2.02 2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Pamekasan	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang difasilitasi	30	249.600.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Pamekasan	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang difasilitasi	30	149.370.000	(100.230.000)	
6 1 3	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Kab. Pamekasan	<b>Persentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal A</b>	75%	2.055.177.000	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Kab. Pamekasan	<b>Persentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal A</b>	80%	1.202.202.000	(852.975.000)	
6 1 3 2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>	Kab. Pamekasan	<i>Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan</i>	100%	56.987.000	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>	Kab. Pamekasan	<i>Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan</i>	100%	6.987.000	(50.000.000)	
6 1 3 2.01 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Pamekasan	Jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan yang dirumuskan	2	56.987.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Pamekasan	Jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan yang dirumuskan	2	6.987.000	(50.000.000)	
6 1 3 2.01 2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Pamekasan	Jumlah kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	0	-	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Pamekasan	Jumlah kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	0	-	-	
6 1 3 2.02	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	Kab. Pamekasan	<b>Persentase Rekomendasi Hasil pendampingan dan asistensi yang ditindaklanjuti</b>	75%	1.998.190.000	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	Kab. Pamekasan	<b>Persentase Rekomendasi Hasil pendampingan dan asistensi yang ditindaklanjuti</b>	80%	1.195.215.000	(802.975.000)	
6 1 3 2.02 1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pamekasan	Jumlah pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	4	1.308.210.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pamekasan	Jumlah pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	4	940.650.000	(367.560.000)	Rencana Aksi atas hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya pada Penguatan Pengawasan (Bimbingan Teknis Manajemen Risiko)
6 1 3 2.02 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Pamekasan	Jumlah pendampingan, verifikasi dan asistensi penilaian Reformasi Birokrasi yang difasilitasi	21	146.220.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Pamekasan	Jumlah pendampingan, verifikasi dan asistensi penilaian Reformasi Birokrasi yang difasilitasi	21	58.890.000	(87.330.000)	
6 1 3 2.02 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Pamekasan	Nilai Capaian Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi KPK	85%	341.260.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Pamekasan	Nilai Capaian Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi KPK	85%	159.760.000	(181.500.000)	
6 1 3 2.02 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Pamekasan	Jumlah pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas yang difasilitasi	44	202.500.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Pamekasan	Jumlah pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas yang difasilitasi	44	35.915.000	(166.585.000)	

Pamekasan, 28 Juli 2022





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MOHAMAD ALWI, S.Sos, M.Si, CGCAE

Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Jabatan : Bupati Pamekasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,

H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Pihak Pertama,

H. MOHAMAD ALWI, S.Sos, M.Si, CGCAE

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Melalui Penguatan Pengawasan	Nilai SAKIP Pemda	81,34
		Opini BPK	WTP
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Tingkat Kapabilitas APIP	3
		Tingkat Maturitas SPIP	3,2
		Jumlah Temuan BPK	11
		Prosentase Pelanggaran Pegawai	0,16
		Persentase Rencana Pengawasan Internal Yang Terselenggara dengan tepat waktu	88%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	87
4	Meningkatnya Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien	Persentase Layanan Kesekretariatan yang Terpenuhi	88%
5	Meningkatnya kualitas Pengendalian Internal	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal A	80%
6	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	152
		Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1
		Jumlah ASN yang terfasilitas	27
		Jumlah sarana yang layak fungsi	158

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	1010
		Jumlah Barang Milik Daerah Yang Layak Pakai	201
7	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu terbit tepat waktu	60%
8	Tersusunnya Rancangan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan dengan tepat waktu	100%
9	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase Rekomendasi Hasil pendampingan dan asistensi yang ditindaklanjuti	80%

Program / Kegiatan	Anggaran	Ket
<b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 3.976.529.450,-</b>	<b>APBD</b>
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 54.350.000,-	APBD
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.800.506.866,-	APBD
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 336.930.000,-	APBD
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 270.922.800,-	APBD
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Rp 188.605.600,-	APBD
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 93.140.184,-	APBD
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 232.074.000,-	APBD

<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Ket</b>
<b>2. Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Rp 1.576.603.000,-</b>	<b>APBD</b>
a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp 1.293.183.000,-	APBD
b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp 283.420.000,-	APBD
<b>3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Rp 2.055.177.000,-</b>	<b>APBD</b>
a. Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	56.987.000,-	
b. Pendampingan dan Asistensi	1.998.190.000,-	
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 7.608.309.450,-</b>	

Pamekasan, **31** Januari 2022

Pihak Kedua,  
Bupati Pamekasan



H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Pihak Pertama,  
Inspektur Daerah



H. MOHAMAD ALWI, S.Sos, M.Si, CGCAE



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MOHAMAD ALWI, S.Sos, M.Si, CGCAE

Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. BADDRUT TAMAM, S.Psi, M.HP

Jabatan : Bupati Pamekasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 01 November 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. BADDRUT TAMAM, S.Psi, M.HP

H. MOHAMAD ALWI, S.Sos, M.Si, CGCAE

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Tingkat Kapabilitas APIP	3
		Tingkat Maturitas SPIP	3,2
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	87

Program	Anggaran	Ket
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Rp 4.117.073.117,-	P-APBD
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 1.367.303.000,-	P-APBD
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 1.202.202.000,-	P-APBD
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 6.686.578.117,-</b>	

Pamekasan, 01 November 2022

Pihak Kedua,  
Bupati Pamekasan

Pihak Pertama,  
Inspektur Daerah

  
H. BADDRUT TAMAM, S.Psi, M.HP

  
H. MOHAMAD ALWI, S.Sos, M.Si, CGCAE



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Jokotole No. 143 Telp. ( 0324 ) 322613 Pamekasan

Pamekasan, 05 Januari 2023

Nomor : 050 / 09.A / 432.200 / 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Evaluasi Hasil Rencana Kerja  
(RENJA) Tahun Anggaran 2022  
-----

Kepada  
Yth. Kepala BAPPEDA  
Kabupaten Pamekasan  
di-  
PAMEKASAN

Bersama ini kami sampaikan Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan Bagian Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dijadikan maklum.



**MASRUKIN, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19691104 198903 1 005

Formulir E.81  
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten  
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan  
Periode Pelaksanaan 1 Januari s.d. 31 Desember 2022

Indikator dan Target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III		IV		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6* 100%		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6* 100%		17
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Melalui Penguatan Pengawasan	Nilai SAKIP;	82,1 (A)	10.290.739.680	70,12	3.271.764.758	81,34	5.319.275.117	70,12	448.682.557	0	1.045.525.950	0	1.419.149.277	1.762.206.417	70,12	4.676.566.201	86,21%			
		Opini BPK	WTP	2.270.300.000	WTP	919.985.000	WTP	1.367.303.000		-	WTP	-	0	731.665.000	434.902.000	WTP	1.166.567.000	100%			
	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	88 %	5.091.729.680	86,59	2.169.187.588	87	4.117.073.117	0	448.682.557	0	906.646.950	0	1.108.536.903	86,00	1.254.412.527	86,00	3.719.278.937	99%		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	Persentase Layanan Kesekretariatan yang Terpenuhi	90	5.091.729.680	90	2.169.187.588	88	4.117.073.117	20	448.682.557	20	906.646.950	20	1.108.536.903	28	1.254.412.527	88	3.719.278.937	100%	90%	Sekretaris
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	176	58.857.000	144	31.715.000	152	45.232.000	39	-	4	-	69	2.940.000	38	30.873.500	150	33.813.500	99%	75%	Sekretaris
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4	44.825.000	4	22.330.000	4	32.050.000	2	-	1	-	1	-	1	24.639.000	5	24.639.000	125%	77%	Sekretaris
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	42	4.000.000	35	1.902.000	34	4.480.000	0	-	0	-	31	-	-	3.669.500	31	3.669.500	91%	82%	Sekretaris
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dilaksanakan	42	1.804.000	35	1.401.000	34	1.640.000	0	-	0	-	34	-	-	1.325.000	34	1.325.000	100%	81%	Sekretaris
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan	42	2.530.000	33	1.812.000	34	1.882.000	34	-	0	-	0	1.422.000	-	-	34	1.422.000	100%	76%	Sekretaris
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang dilaksanakan	42	1.650.000	33	1.256.000	34	1.500.000	0	-	0	-	0	-	34	1.240.000	34	1.240.000	100%	83%	Sekretaris
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	4	4.048.000	4	3.014.000	12	3.680.000	3	-	3	-	3	1.518.000	3	-	12	1.518.000	100%	41%	Sekretaris

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV						
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6* 100%		17
			k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	6	3.500.000.000	1	1.699.580.933	1	2.917.718.033	1	351.220.897	1	812.952.339	1	881.184.047	1	634.205.380	1	2.679.562.663	100%	92%	Sekretaris
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	33	3.500.000.000	27	1.699.580.933	27	2.917.718.033	27	351.220.897	27	812.952.339	27	881.184.047	27	634.205.380	27	2.679.562.663	100%	92%	Sekretaris
	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	33	600.000.000	27	127.524.000	27	369.999.000	8	27.556.000	4	7.098.000	11	90.479.000	11	237.241.000	34	362.374.000	126%	98%	Sekretaris
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	33	600.000.000	27	127.524.000	27	369.999.000	8	27.556.000	4	7.098.000	11,00	90.479.000	11	237.241.000	34,00	362.374.000	126%	98%	Sekretaris
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	160	412.625.000	111	139.353.917	158	265.040.800	26	37.405.550	46	28.748.100	46	96.640.100	40	104.970.084	158	267.763.634	100%	94%	Sekretaris
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10	15.000.000	7	2.198.000	7	2.323.000	1	-	2	1.136.000	2	830.500	2	162.800	7	2.129.300	100%	92%	Sekretaris
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	80.000.000	45	17.227.747	46	19.060.800	10	4.770.400	20	4.661.300	8	4.089.000	8	5.417.400	46	18.938.100	100%	99%	Sekretaris
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	85.000.000	4	30.198.070	12	62.687.000	3	3.643.500	3	13.686.800	3	13.170.200	3	19.463.500	12	49.964.000	100%	80%	Sekretaris
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4	25.000.000	3	384.800	3	12.220.000	1	-	1	4.020.000	0	-	1	4.250.000	3	8.270.000	100%	68%	Sekretaris
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	100	207.625.000	52	69.345.300	90	188.750.000	11	28.991.650	20	5.244.000	33	78.550.400	26	75.676.384	90	188.462.434	100%	100%	Sekretaris
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	8	125.000.000	11	14.520.000	26	188.605.600	0	-	3	19.050.000	-	-	23	157.342.047	26	176.392.047	100%	94%	Sekretaris
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	8	125.000.000	11	14.520.000	26	188.605.600	0	-	3	19.050.000	-	-	23	157.342.047	26	176.392.047	100%	94%	Sekretaris
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	1010	110.247.680	1381	65.129.395	1010	75.140.184	416	12.255.860	366	14.672.940	478	17.786.412	404	18.140.720	1664	62.855.932	165%	84%	Sekretaris
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	1000	15.000.000	1372	1.753.900	1000	5.389.800	411	-	361	1.780.600	473	658.800	399	2.011.000	1.644	4.450.400	164%	83%	Sekretaris

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6* 100%		
			k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6* 100%		17
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	7	34.857.680	7	28.175.495	7	31.850.384	2	4.755.860	2	8.392.340	2	6.627.612	2	7.729.720	8	27.505.532	114%	87%	Sekretaris
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	3	60.390.000	2	35.200.000	3	38.100.000	3	7.500.000	3	4.500.000	3	10.500.000	3	8.400.000	3	30.900.000	100%	81%	Sekretaris
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Layak Pakai	18	285.000.000	14	91.364.343	201	235.337.500	56	21.244.250,00	56	24.125.571	56	19.507.344	56	71.639.796	224	136.516.961	111%	58%	Sekretaris
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1	45.000.000	1	16.974.980	1	36.071.000	1	2.346.000	1	5.400.000	1	1.847.000	1	13.779.681	1	23.372.681	100%	65%	Sekretaris
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	6	80.000.000	4	50.273.263	4	108.040.500	4	12.228.600	4	14.403.371	4	13.490.583	4	28.043.031	4	68.165.585	100%	63%	Sekretaris
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	10	60.000.000	8	13.420.500	195	25.762.000	50	3.732.000	50	3.400.000	50	3.330.961	50	5.831.000	200	16.293.961	103%	63%	Sekretaris
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	1	100.000.000	1	10.695.600	1	65.464.000	1	2.937.650	1	922.200	1	838.800	1	23.986.084	1	26.684.734	100%	44%	Sekretaris
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	KAPABILITAS APIP	3,1	2.820.300.000	1	1.225.800.000	3,00	1.516.673.000	1	-	1	-	3	785.430.000	3	488.667.000	3,06	1.274.097.000	102%	84%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jumlah Temuan BPK	10	2.270.300.000	14	919.985.000	11	1.367.303.000	-	12	-	12	731.685.000	12	434.902.000	12	1.166.567.000	91%	85%		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan hasil pengawasan internal yang terbit tepat waktu	90%	2.270.300.000	87,54%	919.985.000	88%	1.217.933.000	100%	-	100%	-	96%	677.900.000	97%	351.911.000	97%	1.029.811.000	111%	85%	Sekretaris
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan kinerja yang difasilitasi	45	500.000.000	177	191.901.000	44	537.278.000	32	-	23	-	27	369.515.000	15	150.048.000	97	519.564.000	220%	97%	Sekretaris

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III		IV		k	Rp	k	Rp	
									k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6* 100%		17
			k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan keuangan yang difasilitasi	40	1.250.000.000	67	535.354.000	40	413.258.000	3	-	14	-	9	201.143.000	15	174.321.000	41	375.464.000	103%	91%	Sekretaris
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah reviu laporan kinerja yang difasilitasi	1	60.000.000	1	21.733.000	1	22.145.000	1	-	0	-	0	21.831.000	-	-	1	21.831.000	100%	96%	Sekretaris
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah reviu laporan keuangan yang difasilitasi	1	60.000.000	1	28.350.000	1	22.285.000	1	-	0	-	0	22.115.000	-	-	1	22.115.000	100%	95%	Sekretaris
	Pengawasan Desa	Jumlah pengawasan desa yang difasilitasi	45	300.300.000	23	129.472.500	39	175.065.000	179	-	0	-	0	50.811.000	4	24.856.000	183	75.667.000	469%	43%	Sekretaris
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti	85%	100.000.000	93,00%	13.174.500	94%	47.902.000	93,50%	-	93,96%	-	95,95%	12.485.000	-	2.685.000	95,95%	15.170.000	102%	32%	Sekretaris
		Persentase pelanggaran pegawai	0,14%	550.000.000	0,000457178	305.815.000	0,16%	149.370.000	0,06%	-	0,06%	-	0,08%	53.765.000	0,13%	53.765.000	0,13%	107.530.000	119%	72%	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu terbit tepat waktu	65%	550.000.000	75,6%	305.815.000	60%	149.370.000	100%	-	80%	-	78%	53.765.000	54%	82.991.000	54%	136.756.000	90%	92%	Sekretaris
	Peranganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah penanganan penyelesaian kerugian negara atau daerah yang ditindaklanjuti	4	150.000.000	-	-	2	-	0	-	0	-	1	-	1	-	2	-	100%	100%	Sekretaris
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang difasilitasi	10	400.000.000	31	305.815.000	30	149.370.000	1	-	4	-	4	53.765.000	4	82.991.000	13	136.756.000	43%	92%	Sekretaris
		MATURITAS SPIP	3,3	5.199.010.000	3,045	1.102.577.170	3,2	1.202.202.000	3,045	-	-	-	-	-	-	-	3,415	-	107%	0%	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal A	85%	5.199.010.000	66,67%	1.102.577.170	80%	1.202.202.000	0	-	0%	-	138.879.000	310.612.374	74%	507.785.880	74%	957.287.284	92%	80%	Sekretaris dan IRBANWIL
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan	100%	50.000.000	-	-	100%	6.987.000	0%	-	50%	-	300%	-	50%	5.508.000	400%	5.508.000	400%	79%	Sekretaris
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan yang dirumuskan	2	50.000.000	-	-	2	6.987.000	0	-	1	-	6	-	1	5.508.000	8	5.508.000	400%	79%	Sekretaris

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III		IV		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6* 100%		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6* 100%		17
			k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
	Pendampingan dan Asistensi	Persentase rekomendasi hasil penumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang ditindaklanjuti oleh OPD	85%	5.149.010.000	79,17%	1.102.577.170	80%	1.195.215.000	10%	-	23%	138.879.000	30%	310.612.374	17%	502.287.890	80%	951.779.264	100%	80%	Sekretaris
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	33	3.500.000.000	2	828.362.720	4	940.850.000	1	-	1	138.879.000	1	290.380.374	1	380.154.130	4	779.413.504	100%	83%	Sekretaris
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah pendampingan, verifikasi dan asistensi penilaian Reformasi Birokrasi yang difasilitasi	43	446.270.000	11	34.567.000	21	58.890.000	0	-	11	-	10	16.434.000	-	-	21	16.434.000	100%	28%	Sekretaris
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Nilai Capaian Akai Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi KPK	90%	709.720.000	81,00%	203.915.850	85%	159.760.000	10%	-	37%	-	73%	17.148.000	90	122.133.760	90%	139.281.760	106%	87%	Sekretaris
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas yang difasilitasi	44	493.020.000	11	35.731.600	44	35.915.000	0	-	41	-	3	16.650.000	-	-	44	16.650.000	100%	46%	Sekretaris
			Rata-rata capaian kinerja (%)																125%	77%	
			Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Tinggi	
<b>Faktor pendorong keberhasilan kinerja :</b>																					
1. Asistensi dan pendampingan oleh Instansi Pembina Pengawasan (KEMENDAGRI, BPKP dan INSPEKTORAT PROVINSI)																					
2. Tingginya komitmen APIP untuk melaksanakan setiap penugasan pengawasan																					
<b>Faktor penghambat pencapaian kinerja :</b>																					
1. Jumlah Pengawasan Mandatori dan pelimpahan pengaduan masyarakat yang tidak sebanding dengan jumlah SDM APIP																					
2. Belum terdapat regulasi penugasan pengawasan yang overlapping sehingga biaya pengawasan tidak bisa dibebankan																					

\*) Disi oleh Kepala Bappeda





BUPATI PAMEKASAN

# Piagam Penghargaan

Nomor : 002.6/551/432.031/2022

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA:

**E-LAHAP**

(ELEKTRONIK LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN)

INSPEKTORAT DAERAH

SEBAGAI

**TOP 10 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TERPUJI**

PENILAIAN KINERJA DAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK

KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022

KATEGORI

**INOVASI**

Pamekasan, 30 Desember 2022

BUPATI PAMEKASAN



BADDRUT TAMAM